

>> Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Tidak Memberikan Perbedaan Apa pun

Untuk menghilangkan bias gender FITK pernah membentuk *vocal point* untuk mengkritisi masalah keperempuanan. Matakuliah bermuatan gender termaktub dalam matakuliah pendidikan kewargaan dan keagamaan. Apabila ada korban perilaku bias gender maka fakultas akan memberikan pembelaan kepada korban.

ANDA JANGAN HERAN apabila berkunjung ke Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) lebih sering menemui kaum hawa daripada kaum adam. Misalnya di setiap *halaqoh* dan diskusi lesehan mahasiswa yang kerap diadakan di lobi fakultas, pesertanya lebih banyak kaum perempuan ketimbang laki-laki. Maklum saja jika realitanya demikian. Menurut data yang diperoleh dari Simak FITK menunjukkan jumlah mahasiswa FITK memang didominasi perempuan.

Hingga saat ini FITK memiliki 8.298 orang mahasiswa, di antaranya 2.582 laki-laki dan 4.698 perempuan. Jumlah tersebut tentu sangat fantastis jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa fakultas lain di lingkungan UIN Jakarta. FITK adalah fakultas terbesar dan salah satu fakultas tertua di kampus ini. Mahasiswa FITK berasal dari beragam latar belakang budaya dan status sosial dan ekonomi yang

berbeda. Meski demikian, seluruh mahasiswa mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama dalam bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.

Menurut Dekan FITK Prof Dr Dede Rosyada, keberadaan mahasiswa perempuan hampir mendominasi semua jurusan dan program studi, kecuali di Jurusan Manajemen Pendidikan dan Pendidikan IPS mahasiswa laki-laki lebih dominan daripada mahasiswa perempuan. "Perempuan lebih mayoritas tak berarti kita lebih berpihak pada mereka. Sebab berdasarkan persaingan saringan ujian masuk setiap tahun memang perempuan lebih banyak yang lulus," tegas Dede ketika ditemui pada awal September.

Namun keadaan mahasiswa berbeda dengan keadaan perempuan di kalangan dosen. Menurut data Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian UIN Jakarta, jumlah pegawai negeri sipil laki-laki hampir dua kali lipat dari jum-





lah dosen perempuan dengan presentase 63,6 persen dan 36,4 persen. Dilihat dari tingkat pendidikannya, pendidikan dosen laki-laki juga lebih tinggi daripada perempuan. Hingga sekarang FITK memiliki dosen dan pegawai tetap sebanyak 162 orang; 37 orang di antaranya bergelar doktor dengan laki-laki sebanyak 32 orang dan perempuan berjumlah 5 orang. Sedangkan yang bergelar magister jumlahnya 97 orang; 56 laki-laki dan 41 perempuan. Yang berpendidikan sarjana jumlahnya 19 orang; 9 laki-laki, dan 10 perempuan. Dan yang berpendidikan diploma tiga (D3) dan SMA masing-masing dua orang dan tujuh orang.

Sepengetahuan Dede, dirinya tidak pernah mendengar dan menerima laporan tentang sivitas akademika fakultasnya yang mengalami diskriminasi layanan karena perbedaan jenis kelamin. Di FITK semua sivitas akademika mendapatkan pelayanan sama siapa pun itu. Apabila di lembaganya ada laporan perlakuan bias gender maka dirinya akan segera memberikan pembelaan kepada korban. "Sebab kami tidak pernah memberikan perbedaan-perbedaan apa pun," tegasnya.

Untuk mengantisipasi atau menangani tindakan bias gender, FITK tak akan menunjuk pejabat khusus atau membentuk *gender corner*. Sebab pada tahun akademik 2004-2005, FITK sudah melakukan pencegahan tindakan tersebut melalui pembentukan *vocal point* yang tugasnya mengkritisi masalah keperempuanan dan menghilangkan diskriminasi terhadap kaum hawa. Namun lembaga itu kini sudah tiada karena FITK berhasil menghilangkan tindakan diskriminasi berdasarkan gender.

Langkah lainnya yang ditempuh FITK dalam mengupayakan kesetaraan gender, mahasiswa dibekali pengetahuan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Muatan kesetaraan gender diajarkan di matakuliah

pendidikan kewargaan dan matakuliah keagamaan, tetapi fokusnya lebih banyak di pendidikan kewargaan. "Kita mengajarkan kesetaraan gender kepada mahasiswa, misalnya setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama sebagai warganegara," ungkap pria berkacamata ini.

Dede menjelaskan porsi kurikulum kesetaraan gender tak begitu banyak hanya dua SKS yang pokok bahasannya sekitar dua sampai tiga point. Akan tetapi, menurutnya, muatan kesetaraan gender sebenarnya menyebar dalam seluruh topik misalnya tentang hak berpolitik, hak sebagai warganegara dan *civil society*. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa sekian persen topiknya tentang perempuan dan laki-laki.

Di tingkat kemahasiswaan, para mahasiswa FITK rajin mengadakan berbagai kegiatan akademik dan sosial. Setiap kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa tidak pernah mencerminkan bias gender karena fakultas mengajarkan dan mengarahkan perilaku bias gender. Hingga saat ini pemimpin fakultas belum pernah mendapatkan laporan kegiatan kemahasiswaan mendiskriminasi perempuan atau lainnya.

Meski status dosen laki-laki lebih banyak yang bergelar profesor dan doktor tetapi peluang dosen perempuan untuk menjadi pemimpin fakultas atau lembaga di lingkungan FITK tetap terbuka lebar. Sebab saat ini beberapa dosen perempuan sudah ada yang berhasil menduduki jabatan strategis di tingkat jurusan. Mereka menjadi komando di pusat jaminan mutu, Jurusan IPA, Prodi Fisika, Prodi Matematika, Sekjur PBI, Sekjur PBSI, Sekjur PBA, Sekjur IPA, Kaprodi PGMI, dan Pudek Akademik.

Produktivitas kaum hawa sebanding dengan kaum adam. Di dalam penelitian dan penulisan buku kaum hawa sangat produktif sama halnya produktivitas kaum adam.[]

AKHWANI SUBKHI

Dekan FITK, Prof. Dr. Dede Rosyada, MA

Mahasiswi Lebih Banyak Daripada Mahasiswa

Bisa Anda jelaskan mengenai gender mainstreaming di FITK?

Gender mainstreaming di sini adalah gender yang tak ada perbedaan, semuanya mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Di FITK jumlah mahasiswa perempuan lebih banyak daripada mahasiswa laki-laki dengan persentasenya sekitar 60 persen dan 40 persen. Mahasiswa perempuan mendominasi di beberapa jurusan seperti Pendidikan Matematika, PAI, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan IPA, sedangkan di Jurusan Manajemen Pendidikan dan Pendidikan Bahasa Arab didominasi laki-laki. Keadaan demikian bukan menandakan adanya bias gender. Sebab itu bukan kebijakan fakultas tetapi karena tingkat atau daya persaingan mereka, kebetulan yang masuk ke mari lebih banyak perempuan. Jadi tidak ada bias gender di sini.

Di lingkungan dosen dan karyawannya?

Jumlah dosen laki-laki dan perempuan komposisinya mungkin relatif sama, tetapi di jurusan-jurusan *science* lebih banyak perempuannya. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya maka pendidikan dosen laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan karena hanya seorang perempuan yang memperoleh gurubesar, sedangkan di lingkungan dosen laki-laki, gurubesarnya ada belasan orang. Dosen perempuan yang bergelar doktor juga belum begitu banyak. Selama ini tingkat pendidikan dosen laki-laki masih unggul dibandingkan tingkat pendidikan perempuan. Sementara itu di tingkat karyawan jumlah perempuan lebih banyak. Kita memiliki karyawan tetap tigabelas orang, beberapa posisi dipegang perempuan seperti kasubag dua orang perempuan dan staf-staf di masing-masing unit juga lebih banyak perempuan.

Adakah keinginan Anda untuk meningkatkan pendidikan dosen perempuan?

Sekarang semua dosen perempuan di jurusan *science* sedang pada kuliah menempuh program doktor, tetapi mereka kuliah lagi bukan karena aspek gender melainkan karena kita memang membutuhkan para dosen yang bergelar doktor. Kami tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, semuanya diberikan perlakuan, kesempatan dan hak yang sama.

Apakah di FITK ada perlakuan atau kebijakan yang bias gender?

Tidak ada, semua mendapatkan perlakuan sama. Begini, ya, dalam jabatan juga tidak ada bias gender misalnya pertimbangan antara laki-laki dan perempuan, semuanya bersaing sehat saja. Siapa yang ingin menjadi pemimpin

fakultas atau pembantu dekan ya maju saja, dan siapa yang lebih baik itu yang kami pilih. Sekarang salah satu pembantu dekan di FITK adalah perempuan yakni Pembantu Dekan Bidang Akademik. Ketua Jurusan Matematika dan IPA juga perempuan. Bahkan beberapa sekretaris jurusan kebanyakan dipegang oleh perempuan.

Bagaimana dalam perekrutan dosen dan karyawan?

Tidak ada bias gender juga. Kita merekrut sesuai kriteria dan kompetensi. Laki-laki dan perempuan bersaing sesuai kompetensi saja, jika sesuai kompetensinya ya kita rekrut, jadi bukan karena ia laki-laki atau perempuan. Intinya jika ada yang mau bergabung sesuai kompetensinya maka kita akan loloskan. Pada tahun ini kita merekrut tujuh dosen dan tiga di antaranya adalah perempuan. Jadi perempuan di sini banyak yang masuk.

Bagaimana Anda menghilangkan bias gender di FITK?

Ya dibudayakan dan diperkuat, dari sekarang semua kebijakan dan sistem tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Sekarang ada *treatment*, misalnya dalam penugasan pengabdian kepada masyarakat di daerah X tapi karena ia perempuan maka ia tidak bisa ikut, hal seperti itu kita hindari. Data-data seperti ini merupakan sebuah *input* sejarah bahwa FITK telah melakukan ini, sehingga ke depan orang-orang tidak perlu lagi mengulang kesalahan karena *basic cultural*-nya sudah kuat. Di sini banyak dosen dan karyawan perempuan yang berkembang.

Komposisi pemimpin fakultas sering didominasi laki-laki. Apa komentar Anda?

Ya persoalannya karena tidak ada perempuan. Ini bukan berarti perempuan tidak bisa menjadi pemimpin tapi untuk pudek memang syaratnya harus doktor dan golongan sekian, kebetulan yang memenuhi persyaratan laki-laki. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi; jadi bukan karena ia perempuan lalu tidak bisa menjadi pemimpin. Tetapi kalau anda lihat di jurusan banyak kajar yang perempuan. Untuk *gender mainstreaming* tidak berarti kita harus melawan aturan. Jangan sampai karena keterwakilan perempuan tidak ada maka perempuan yang tidak memenuhi persyaratan dimasukkan nanti akan merusak sistem, kita di sini semuanya berdasarkan sistem. Apabila tidak sesuai sistem maka kita akan disalahkan oleh pengambil keputusan. Jika ada perempuan yang memenuhi kualifikasi dan sudah siap ya silahkan maju nanti kita pilih bersama tapi dia harus mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain sehingga untuk memilihnya.[]

>> Fakultas Adab dan Humaniora

Dosen Perempuan Lebih Sedikit karena Kebetulan

Komposisi dosen laki-laki dan perempuan belum cukup ideal. Pihak dekanat sedang fokus pada sertifikasi dosen, monitoring dan evaluasi, reakreditasi prodi dan bisa membuka program Magister BSA dan SPI.

NURILAH ARIYANI, SEBUT saja nama seorang perempuan itu. Mahasiswi tingkat akhir pada Prodi Bahasa dan Sastra Inggris (BSI) itu tampak bersemangat mempertahankan pendapatnya ketika beradu argumen dengan teman lakinya dalam satu kesempatan diskusi di kelasnya. Sementara dosennya terlihat serius memperhatikan dinamika para mahasiswanya itu. Tidak tampak sedikit pun dari sikap dosen yang mengunggulkan satu mahasiswa atas lainnya. Semuanya diberikan ruang dan kebebasan yang sama bagi setiap mahasiswa dalam mengutarakan pendapat di kelas.

Begitulah suasana pengajaran di salah satu kelas Fakultas Adab dan Humaniora (FAH). Tenang, tanpa membedakan latar belakang mahasiswa, dan sarat dengan nuansa kekeluargaan. Hal ini seperti yang diungkapkan Dekan FAH, Dr. H. Abd. Wahid Hasyim, M.Ag. “Setiap dosen FAH memberikan kesempatan yang sama bagi para mahasiswanya dalam belajar, baik di kelas maupun di luar ruangan. Tidak ada perlakuan yang membedakan,” imbuhnya.

Model pembelajaran ini, lanjut Wahid, sudah berlangsung lama di FAH. Setiap mahasiswa memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama dalam mengemukakan pendapat di kelas, baik saat mendengarkan dosen ceramah, maupun saat sesi diskusi di kelas. “Kemampuan seseorang bukan diukur dari jenis kelaminnya, tapi prestasinya,” kata doktor

Sejarah Islam ini.

Bila melacak pada masa-masa sebelumnya, model pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan Islam cenderung bias gender. Jangankan mengutarakan pendapat yang diatur, posisi tempat duduk saja dikendalikan oleh pihak dosen. Seperti di antaranya cara menyampaikan pelajaran dengan ditutupi dengan hijab untuk perempuan, murid laki-laki dan perempuan harus dipisah, hingga pada pengaturan perempuan dalam mengutarakan pendapat.

Sementara di IAIN (kini UIN), model pembelajaran seperti itu tidak berlaku. Wahid menuturkan, sejak dia mahasiswa hingga kini, IAIN sangat moderat dalam mengembangkan pengajaran dan pendidikannya, khususnya dalam memperlakukan setiap mahasiswa. Tidak pernah ada perlakuan yang istimewa terhadap satu mahasiswa atas mahasiswa lainnya, hanya karena pertimbangan gender.

Begitu pula saat dia menjabat sebagai Dekan bagi fakultas yang sudah berumur setengah abad ini (24 Agustus 1960-24 Agustus 2010). Pihaknya mengaku memberikan peluang dan kesempatan yang sama, kepada dosen, pegawai, dan mahasiswa. Peluang itu baik dalam kesempatan belajar dan tunjangan kesejahteraan yang layak bagi dosen, mendapatkan perlakuan yang adil pada pegawai, serta menerima pelajaran dan pelayanan akademik bagi mahasiswa. “Kami profesional saja,” tegasnya.





Kendati begitu, bila melihat komposisi dosen didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, jumlahnya relatif belum cukup ideal, dalam pengertian *fifty-fifty*. Dari laporan tahunan menunjukkan bahwa jumlah dosen FAH mencapai 128 orang yang terdiri dari dosen tetap 84 orang dan dosen tidak tetap 44 orang.

Untuk dosen tetap, misalnya, dari besaran itu, 21 di antaranya adalah dosen perempuan. Sementara sisanya, 64 dosen laki-laki.

Demikian juga, bila dari komposisi itu dilihat perbedaan berdasarkan latar belakang pendidikan S2 dan S3. Dosen pendidikan S2 mencapai 60 orang, dan S3 25 orang. Dari itu, mayoritas dosen perempuan pendidikannya hanya sampai S2. Di antara dosen yang pendidikannya S3 adalah Dr Nabilah Lubis dan Dr. Rd Yaniah Wardani.

Adapun dosen yang jabatannya sebagai gurubesar, dari sembilan orang yang dimiliki FAH, satu di antaranya adalah perempuan, dia adalah Prof Dr Nabilah Lubis.

Selain itu, FAH adalah fakultas pertama—yang kemudian juga di Fakultas Psikologi—yang pemimpinya pernah dipegang oleh perempuan. Yaitu oleh Prof Dr Nabilah Lubis periode 1994-1998. Sejak berdiri pada 1960 hingga 2010 ini, pucuk kepemimpinan dekan FAH selalu didominasi oleh laki-laki, seperti halnya fakultas-fakultas lainnya di UIN Jakarta.

Dari data itu memperlihatkan bukan berarti FAH memberikan perlakuan yang berbeda terhadap dosen perempuan dan laki-laki. Seperti yang dikatakan Wahid, dalam rekrutmen dosen, misalnya, pihaknya membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang akan mendaftar di fakultas. Namun siapa saja yang lulus dan diterima, tergantung prestasi dan kemampuannya, bukan karena seorang itu laki-laki atau perempuan. “Kalaupun jumlah dosen laki-laki lebih banyak dari perempuan itu kebetulan saja,” ucapnya.

Dari data dosen yang ada itu, sejumlah dosen ada yang tengah melanjutkan pendidikannya lagi. Artinya sangat

mungkin terjadi penambahan jumlah dosen perempuan atau laki-laki yang meningkat pendidikannya, dari S2 menjadi S3 atau bahkan menjadi gurubesar. “Kita selalu mendorong kepada setiap dosen untuk terus meningkatkan kemampuan akademiknya”.

Perbedaan dari segi besaran jumlah dosen antara perempuan dan laki-laki, jelas Wahid, tidak membuat beda dalam mekanisme pembelajaran yang dikembangkan masing-masing dosen di kelas. Kesan dosen perempuan yang terlalu sensitif, terlalu emosional atau tidak tegas, tidak ditemukan saat mereka mengajar. Begitu juga pada dosen laki-laki. Semuanya sama, hanya barangkali, kata Wahid, model penyampaiannya, ada yang dengan metode ceramah, diskusi, atau semacamnya.

Bila komposisi perempuan dengan laki-laki di level dosen berbeda jauh, tidak halnya di level kepegawaian. Menurut data terbaru yang dilansir FAH, bahwa jumlah tenaga administrasi tahun akademik 2010/2011 mencapai 22 orang, termasuk yang honorer SK Rektor dan SK Dekan. Dari itu, 12 di antaranya adalah perempuan, sementara 10 adalah laki-laki.

Data itu seperti membuktikan kesan bahwa perempuan memiliki karakter teliti, giat, rajin, dan lain sebagainya, yang merupakan karakter-karakter utama untuk bertugas di keadministrasian. Namun Wahid menolak anggapan itu. Selama pantauannya seluruh jajaran di administrasi, tidak ada perbedaan mencolok antara tenaga kerja laki dan perempuan. “Semuanya sama, bekerja dan sadar akan masing-masing tanggung jawab dan tupoksinya,” katanya. Demikian juga dengan jumlah, tergantung yang mendaftar ke fakultas, tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin.

Adapun jumlah mahasiswa FAH tahun akademik ini mengalami peningkatan, yaitu mencapai 430, dari sebelumnya 264 orang. Peningkatan itu juga secara otomatis terjadi pada jumlah mahasiswa perempuan. Dari jumlah yang ada, sebarannya masing-masing pada Prodi BSA mencapai 116 mahasiswa, naik dari 54 orang. Prodi SPI mencapai 39 orang dari 11 orang, Prodi Tarjamah 33 orang dari dua orang, Prodi IPI mencapai 92 orang dari 38 orang, dan Prodi BSI ada 150 dari sebelumnya 159 orang.

Menurut Wahid, setiap tahunnya ada penyusutan hingga 10 persen. “Jumlah mahasiswa pada tahun ini, boleh jadi mengalami penyusutan ketika mereka sudah meningkat ke semester berikutnya. Itulah yang terjadi dalam penurunan angka-angka itu,” urainya. Hal ini merupakan gejala umum yang terjadi di fakultas-fakultas.

Faktornya banyak. Di antaranya adalah biaya kuliah pada masing-masing mahasiswa. Selain itu juga ada yang mahasiswa yang memilih pindah kuliah ke kampus lain dan bahkan ada juga yang belum terverifikasi datanya, terutama untuk kasus mahasiswa yang terlambat bayar. Adapun pada Prodi BSI, bukan berarti menurun. Melainkan, kata Wahid,

pihak fakultas memiliki kebijakan untuk mengurangi kuota, terkait keterbatasan jumlah dosen.

Menurut Wahid, pihaknya selama enam bulan ke belakang tengah melakukan sejumlah agenda penting, selain agenda rutin, seperti belajar mengajar, dan pelayanan akademik. Di antaranya, melakukan sejumlah perbaikan kurikulum di beberapa prodi (SPI, BSI, dan BSA), mengadakan seminar dan kuliah umum. Di antaranya kuliah umum mengenai kesusastraan dengan pembicara asal dari Iran. Ada juga seminar kesusastraan arab dengan pembicara dari Arab Saudi, seminar dengan pembicara dari Yaman dan Amerika.

Dekan FAH, Dr Abd. Wahid Hasyim, MA Perempuan dan Laki-laki Diberi Kesempatan Sama

Bagaimana model pembelajaran di FAH selama ini?

Setiap dosen FAH memberikan kesempatan yang sama bagi para mahasiswanya dalam belajar, baik di kelas maupun di luar ruangan. Tidak ada perlakuan yang membedakan. Suasana ini sudah berlangsung lama di FAH. Setiap mahasiswa memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama dalam mengemukakan pendapat di kelas, baik saat mendengarkan dosen ceramah, maupun saat sesi diskusi di kelas. Kemampuan seseorang bukan diukur dari jenis kelaminnya, tapi prestasinya. Sejak saya mahasiswa hingga kini, IAIN sangat moderat dalam mengembangkan pengajaran dan pendidikannya, khususnya dalam memperlakukan setiap mahasiswanya. Tidak pernah ada perlakuan yang istimewa terhadap satu mahasiswa atas mahasiswa lainnya, hanya karena pertimbangan gender.

Kebijakan FAH sendiri seperti apa?

Memberikan peluang dan kesempatan yang sama, kepada dosen, pegawai, dan mahasiswa. Peluang itu baik dalam kesempatan belajar dan tunjangan kesejahteraan yang layak bagi dosen, mendapatkan perlakuan yang adil pada pegawai, serta menerima pelajaran dan pelayanan akademik bagi mahasiswa. Kami profesional saja.

Dalam rekrutmen dosen, FAH membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang akan mendaftar di sini (FAH). Namun siapa saja yang lulus dan diterima, tergantung prestasi dan kemampuannya, bukan karena seorang itu laki-laki atau perempuan. Dan walaupun jumlah dosen laki-laki lebih banyak perempuan itu kebetulan saja.

Bagaimana perbandingan antara dosen dan perempuan?

Perbedaan jumlah dosen antara perempuan dan laki-laki, tidak membuat beda dalam mekanisme pembelajaran

Di samping itu, dalam rangka penguatan dosen adalah mengirimkan dosen-dosen FAH ke IMLA, sebuah lembaga kajian di Malang dan Surabaya. Dan ada juga dosen yang mengikuti Diklat Bahasa di Saudi Arabia.

Wahid mengaku, pihaknya baru enam bulan kurang menjabat sebagai dekan. Fokus perhatiannya antara lain diarahkan pada sertifikasi dosen, monitoring dan evaluasi, reakreditasi prodi. Pihaknya mengharapkan bisa mempertahankan akreditasi A pada Prodi BSA, SPI, Tarjamah, dan BSI, bahkan bisa meningkatkan akreditasi Prodi IPI. Bukan hanya itu, dia berharap bisa membuka program Magister BSA dan SPI.[]

AHMAD MUSTAFA

yang dikembangkan masing-masing dosen di kelas. Dosen perempuan yang terlalu sensitif, terlalu emosional atau tidak tegas, tidak ditemukan saat mereka mengajar. Begitu juga pada dosen laki-laki. Semuanya sama, hanya barangkali, model penyampaiannya, ada yang dengan metode ceramah, diskusi, atau semacamnya.

Perempuan biasanya lebih banyak di staf administrasi?

Selama pantauannya seluruh jajaran di administrasi, tidak ada perbedaan mencolok antara tenaga kerja laki dan perempuan. Semuanya sama, bekerja dan sadar akan masing-masing tanggung jawab dan tupoksinya. Demikian juga dengan jumlah, tergantung yang mendaftar ke fakultas, tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin.

Bagaimana dengan perbandingan jumlah mahasiswa perempuan dan laki-laki?

Adapun jumlah mahasiswa FAH tahun akademik ini mengalami peningkatan, yaitu mencapai 430, dari sebelumnya 264 orang. Peningkatan itu juga secara otomatis terjadi pada jumlah mahasiswa perempuan. Jurusan BSA mencapai 116 mahasiswa, naik dari 54 orang. SPI mencapai 39 orang dari 11 orang, Tarjamah 33 orang dari dua orang, IPI mencapai 92 orang dari 38 orang, dan BSI ada 150 dari 159 orang. Setiap tahunnya ada penyusutan hingga 10 persen. Jumlah mahasiswa pada tahun ini, boleh jadi mengalami penyusutan ketika mereka sudah meningkat ke semester berikutnya. Itulah yang terjadi dalam penurunan angka-angka itu.

Apa penyebabnya?

Faktornya banyak. Di antaranya adalah biaya pada masing-masing mahasiswa. Selain itu juga ada yang mahasiswa yang memilih pindah kuliah ke kampus lain dan bahkan ada juga yang belum terverifikasi datanya, terutama untuk kasus mahasiswa yang terlambat bayar. Adapun pada Prodi BSI, bukan berarti menurun. Melainkan, pihak fakultas memiliki kebijakan untuk mengurangi kuota, terkait keterbatasan jumlah dosen.[]

>> Fakultas Ushuluddin

Kualitas Perempuan Harus Lebih Ditingkatkan

Perbandingan jumlah dosen laki-laki dan perempuan masih jauh. Pun begitu di kalangan staf administrasi dan mahasiswa. Kaum adam mendominasi. Fakultas selalu mendukung semua pihak dalam pengembangan kapasitas keilmuan. Laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan, yang penting kemampuannya.

MENDENGAR KATA USHULUDDIN dan filsafat, mungkin pikiran Anda sejenak melayang ke dunia ide-ide. Yah, filsafat memang selalu diidentikkan dengan berpikir secara mendalam. Fakultas Ushuluddin tak bisa dipisahkan dari hal ini. Tiga program studi di dalamnya, Prodi Perbandingan Agama (PA), Prodi Akidah-Filsafat (AF), dan Prodi Tafsir-Hadits (TH), banyak mempelajari ilmu-ilmu analitis, yang memang dibutuhkan untuk mahasiswa-mahasiswa ketiga prodi tersebut.

Persoalan gender adalah salah satu wacana yang tak

luput dalam pembahasan ilmu-ilmu analitis itu. Gender memang bukan wacana baru, termasuk di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta—yang di dalamnya perkembangan arus pemikiran berkembang cukup pesat. Persoalannya, sejauh ini, sudahkah persamaan dan keadilan gender itu terapkan dalam praktiknya sehari-hari, termasuk di lingkungan Fakultas Ushuluddin?

Fakultas Ushuluddin tampaknya berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Dari sisi prosentasi komposisi gender secara struktural, dapat dilihat perbandingan antara laki-





laki dan perempuan masih cukup jauh. Dari 71 dosen yang ada di fakultas ini, dosen perempuan hanya berjumlah 11 orang. Staf kepegawaian yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 8 orang, sementara laki-laki 12 orang.

Di tingkatan mahasiswa pun menunjukkan hal yang sama. Prodi Perbandingan Agama, mahasiswa perempuannya berjumlah 17 orang dan laki-laki 52 orang. Prodi Tafsir Hadist, laki-laki berjumlah 144 orang dan perempuan 72 orang. Dan, Prodi Akidah-Filsafat, laki-laki berjumlah 65 orang dan perempuan 26 orang. Angka ini hampir sama dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, matakuliah yang membahas khusus tentang persoalan gender hanya ada satu, yakni "Relasi Gender dan Agama".

Menurut Harmaeni Purba, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin, dalam hal pelayanan sama saja antara laki-laki dan perempuan. Di antara mereka tidak ada yang dibeda-bedakan. "Tidak ada yang istimewa. Sebagai pelayan kita kan tidak boleh membedakan baik laki-laki maupun perempuan," tegasnya.

Mengenai perkembangan akademik antara mahasiswa laki-laki dan perempuan, Harmaeni mengatakan bahwa, terjadi perkembangan dalam melihat keaktifan mahasiswi

perempuan. "Saya melihat mahasiswi itu aktif berbicara di beberapa pertemuan. Misalnya, pada saat upacara pelepasan wisuda mereka memberikan masukan-masukan. Salah satu mahasiswi kita juga mendapatkan juara tiga MTQ tingkat nasional yang diadakan di Lampung, Juli 2010," tambahnya.

Menurut Dekan Fakultas Ushuluddin, Prof Dr Zainun Kamal, MA, pihak fakultas selalu mendukung semua pihak, baik dosen, staf, ataupun mahasiswa untuk terus mengembangkan kapasitasnya di berbagai bidang keilmuan, khususnya dalam filsafat Islam. Ia, misalnya, terus mempromosikan dosen-dosen Fakultas Ushuluddin untuk melanjutkan studinya di program S2 dan S3 dalam bidang filsafat Islam. Sayangnya, tak seorang pun di antara mereka yang lulus seleksi ujian. Baginya, antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan, yang penting kemampuannya.

Hal ini juga diakui Harmaeni. Yang terpenting, menurut Harmaeni, hak-hak akademik mereka diberikan sesuai ajaran agama. Selain itu, dari mereka juga harus ada upaya untuk meningkatkan diri supaya setara dengan laki-laki. Misalnya dengan menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, baik di fakultas ataupun program studi.

Meski begitu, sebagai salah satu dosen Fakultas Ushuluddin—yang kebetulan juga konsen pada kajian perempuan—Ida Rosidah, MA, mengatakan bahwa masih perlu meningkatkan wacana kesetaraan gender di lingkungan Fakultas Ushuluddin. Melihat komposisi gender, khususnya di kalangan dosen, menunjukkan bahwa perempuan

masih sangat minim perannya. Menurut Ida, untuk mendukung hal itu, di tingkatan struktural perlu diberlakukan *affirmative action*, misalnya dalam pengangkatan dosen harus seimbang kuota antara laki-laki dan perempuan. Terlepas dari itu, memang kualitas perempuan juga harus lebih ditingkatkan.[]

MILASTRI MUZAKAR

Dekan FU, Prof Dr Zainun Kamal, MA

“Kenapa tidak Muncul dari Perempuan?”

Pandangan Anda secara umum terkait wacana gender di fakultas yang Anda pimpin?

Saya selama ini belum mengamati apa yang terjadi di Fakultas Ushuluddin, karena saya kan baru menjabat. Saya kira, meskipun tidak dapat di kampus, mahasiswa dan dosen mungkin tahu banyak informasi di luar kampus yang mewacanakan tentang hal itu.

Kalau dalam bidang filsafat, perempuan memang teringgal. Dan kita tidak mendengar, terutama di Fakultas Ushuluddin, doktor-doktor perempuan dalam bidang filsafat. Mungkin karena perempuan malas berpikir kali ya, dan ternyata memang di Indonesia belum ada doktor filsafat Islam dari kalangan perempuan.

Dulu IAIN dikembangkan doktor-doktor filsafat, seperti Harun Nasution, Nurcholish Madjid, Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, dan bahkan gurubesar yang terbanyak pasti di Fakultas Ushuluddin. Dan itu laki-laki semua. Kalau dalam pemikiran (filsafat) tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan pasti kemampuannya. Seorang filosof Yunani pernah mengatakan “Saya sangat bahagia karena dilahirkan dari perempuan”

Pernah tidak Fakultas Ushuluddin melakukan langkah-langkah untuk mendukung itu?

Kita mengembangkan wacana itu. Saya mendukung dosen-dosen untuk mengambil studi di program S2 dan S3. Tapi mereka memang tidak mampu. Mereka diberi beasiswa untuk ikut ujian tapi ternyata nggak ada yang lulus. Saya mau bagaimana lagi kalau begitu.

Bagaimana komposisi dosen laki-laki dan perempuan, karyawan, staf, dan mahasiswa?

Saya tidak membeda-bedakan itu, sangat tergantung pada kemampuannya. Karena di hadapan Tuhan juga semua manusia tergantung kemampuannya. Kalau misalnya mereka sendiri yang tidak punya kemauan bagaimana kita bisa menunjuknya. Ada ayat dalam al-Quran yang artinya “serahkanlah segala urusan itu kepada ahlinya”

Maaf saja, waktu saya baru menjabat dekan di sini saya minta supaya ada perempuan untuk duduk membantu saya

(pembantu dekan), tapi dia tidak mau. Bukan karena alasan ketidakmampuan, dia mampu tapi saya nggak tahu dia nggak mau. Begitu pun dosen perempuan, kalau mampu kita akan angkat.

Di sini dosen perempuan juga banyak yang bagus dalam bidang fiqh dan tafsir. Tapi memang maaf saja, yang menjadi kendala bagi perempuan itu, misalnya saya bilang, “Ambil program S2 atau program apa gitu”. Dia bilang, “Waduh ... masalahnya, anak saya masih kecil-kecil”. Nah itu terkadang jadi hambatan bagi perempuan. Apalagi yang masih muda-muda, mau mengambil program pasti memikirkan masih mau hamil lagi. Jadi terkadang masalah keluarga itu jadi kendala buat mereka. Jadi kalau komposisi gender yang Anda tanyakan itu terlalu rendah, bahkan jadi dekan, jadi presiden pun saya dukung.

Menurut Anda penting tidak untuk terus mewacanakan gender?

Bagaimana mau didorong kalau memang tidak mampu, karenanya sangat tergantung dari kemampuan perempuan. Di Indonesia ini kan aneh, perempuan paling banyak tapi kok yang banyak terbelakang perempuan juga. Tentu saja yang harus kita lihat pada perempuannya sendiri. Selain itu, di Indonesia kan pemeluk agama Islam yang paling banyak, tapi yang banyak tafsir dan fikih itu kan produk-produk laki-laki. Kenapa tidak muncul dari perempuan? Kalaupun ada perempuan itu ulama-ulama tradisional yang masih mengutip dari laki-laki. Makanya perempuan yang harus berjuang. Kan aneh kalau kami yang bergerak, tapi anda sendiri tidak mau atau tidak melakukan apa-apa.

Ke depan, apa langkah-langkah Anda untuk mengarusutamakan wacana ini?

Sebenarnya saya kadang-kadang kecewa juga karena mau mengangkat dari perempuan untuk dipromosikan menduduki jabatan tertentu, tapi yang mau diangkat itu tidak ada. Saya memberikan kesempatan kepada siapa saja. Tapi maaf saja, masih banyak yang tidak mau terbuka. Bikin kajian-kajian yang eksklusif. Saya bilang, Fakultas Ushuluddin jangan begitu, terbuka saja. Makanya kita harus terus mengingatkan mereka. Untuk mahasiswa kan banyak wadah untuk berkarya. Untuk dosen juga kita ada diskusi-diskusi. Untuk beasiswa juga sekarang kan banyak kesempatan.[]

>> Fakultas Syariah dan Hukum

Kesetaraan Gender untuk Bersama Bangun Fakultas

Perempuan diberi kesempatan seluas-luasnya. Tidak ada batasan. Karena tujuan yang sama, membangun Fakultas Syariah dan Hukum agar lebih berkualitas. Bagaimana kesetaraan gender dalam fakultas ini? Apakah perempuan terstigmatisasi sebagai sosok yang justru sangat berperan bagi kemajuan fakultas?

JUMAT ITU HARI kelima perkuliahan semester ganjil bagi mahasiswa. Begitu pun dengan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH). Tepat di siang hari nan terik, perkuliahan berlangsung seperti biasa, khususnya di Prodi Perbankan Syariah (PS).

Tahun ini, mahasiswa baru Prodi PS terbagi menjadi lima kelas. Salah satu kelas yang tengah mengadakan perkuliahan, PS B siang itu, dipadati 44 mahasiswa setelah empat hari sebelumnya hanya 40 orang. Meski demikian padat,

keadaan kelas relatif kondusif. Suasana kondusif tersebut tercermin dari tertibnya posisi duduk bagi mahasiswa laki-laki dan perempuan. Mereka duduk bersebrangan. Laki-laki berjumlah 16 orang di sebelah kiri dan perempuan sebanyak 28 orang di sebelah kanan.

”Lumayan *sumpek* juga *sib*. Bangku sering diangkut-angkut karena kurang. Siapa yang cepat dia dapat. Siapa yang lambat, dia *ngangkut*,” ucap Upi Mursyidah, mahasiswi Prodi PS IH. Meski demikian, Upi mengaku bangga dapat





diterima di jurusan yang sangat ia minati.

FSH sendiri mempunyai lima program studi, yaitu Perbandingan Mazhab Hukum (PMH), Studi Akhwal Syakhshiyah (SAS), Studi Jinayah Siyasah (SJS), Studi Muamalat (SMU), dan Ilmu Hukum. Dari kelima prodi tersebut, hanya Prodi PS yang diketuai oleh perempuan, yakni Dr. Euis Amalia, M.Ag. Selain itu, dosen tetap maupun tidak tetap masih didominasi oleh laki-laki.

Menanggapi fenomena di atas, Dekan FSH, Prof Dr Muhammad Amin Suma, berpendapat bahwa dosen yang terdaftar di FSH ini pasti telah melalui serangkaian tahapan. "Kebanyakan laki-laki, karena mungkin intensitas pelamar dosen untuk FSH keseringan laki-laki. Tidak ada batasan, *lab* karena kesempatan perempuan untuk maju diberikan seluas-luasnya. Contohnya saja Prof. Dr Amani Lubis yang kemarin turut mencalonkan diri menjadi dekan FSH," ungkapnya.

Amin menjelaskan, mereka dipilih karena kompetensi dosen tersebut. "Karena *skill*. Tidak dari gender. Jadi *nggak* ada pikiran harus laki-laki dan perempuan," tegasnya. Memang tak dapat dipungkiri, FSH belum pernah dipimpin oleh perempuan.

Terkait dengan rasio dosen tetap dan tidak tetap, menurut data yang dihimpun dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) FSH, dosen di FSH mayoritas lulusan magister. Senada dengan data yang didapat dari Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian UIN, dosen FSH yang lulus dari S3 sebanyak 40 orang yang jika diprosentasekan sebesar 32,3%. Lulusan S2 sebanyak 64 orang (51,6%). Sedangkan karyawan, lulusan S1 sebanyak 11 orang (8,9%). D3 3 orang (2,4%). SMA 4 orang (3,2%). Terakhir, lulusan SD sebanyak 2 orang (1,6%). Sedangkan pegawai negeri sipil, baik

dari tingkat dosen maupun karyawan, laki-laki sebanyak 94 orang (75,8%) dan perempuan sebanyak 30 orang (24,2%).

Sedangkan untuk kuantitas dosen tetap maupun tidak tetap hanya berbanding sedikit. Dosen tetap FSH berjumlah 84 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 74 orang dan perempuan 10 orang. Sedangkan dosen tidak tetap berjumlah 68 orang dengan rincian 15 orang perempuan dan 68 laki-laki. Meski rasio dosen laki-laki lebih banyak, Amin menganggap hal tersebut bukanlah masalah. "Yang terpenting semua elemen turut bekerja sama membangun fakultas yang le-

bih berkualitas," katanya.

Demi membangun fakultas yang berkualitas, mahasiswa FSH juga turut berperan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FSH, Boggie Adhar Frandyas, jumlah aktivis BEMF saat ini diperkirakan mencapai 100 orang. Namun, ratusan aktivis BEMF itu masih didominasi oleh laki-laki. "Memang anggota kepengurusan BEMF itu diambil dari delegasi jurusan masing-masing dan diseleksi lagi. Pada setiap divisi diisi oleh aktivis perempuan, minimal dua orang," jelasnya. Sebagai presiden BEMF, Boggie berusaha untuk menyeimbangkan kuantitas perempuan dan laki-laki. Namun pada praktiknya, aktivis laki-lakilah yang lebih berperan. "Aktivis perempuan yang aktif cuma 25 orang," jelasnya.

Pemilihan aktivis BEMF, lanjut Boggie, dipilih tidak berdasarkan jenis kelamin. "Mereka dipilih karena mempunyai *talent* di bidangnya. Walau pada praktiknya penyesuaian kerja pasti ada," ujarnya. Penyesuaian kerja tersebut terlihat dari jika ada acara seminar, tidak mungkin perempuan diminta untuk mengangkut barang. "Mereka (perempuan, red.) dikasih kerjaan untuk *ngetik* proposal, misalnya," ucapnya.

Meski Boggie dan beberapa temannya berusaha keras untuk membuat program kerja yang berkualitas, terkadang mereka masih menemukan kendala dalam kreativitas lantaran terikat oleh aturan kehadiran di kelas 75%. "Universitas masih sangat kurang memberikan kesempatan kepada aktivis untuk menimba ilmu dan pengalaman dalam berorganisasi, itu tergambar dengan adanya aturan untuk kehadiran 75% dalam perkuliahan sehingga para aktivis jadi berpikir ulang untuk aktif dalam kegiatan BEMF, apa-

lagi aktivis perempuan yang bisa dibilang takut apabila nilai perkuliahan mereka jelek karena kehadiran yang tidak mencapai 75%,” papar Boggie.

Jika Boggie menganggap aturan 75 % membuat hal tersebut sedikit menghambat kreativitasnya, hal tersebut tak terjadi pada salah satu aktivis perempuan BEM FSH, Husnul Hidayati yang sejak semester III sudah berorganisasi. Keterlibatan mahasiswi Prodi PS semester V ini dalam BEM tak jarang mendapatkan hambatan karena ia harus pandai mengatur waktu. ”Sering bentrok antara kuliah

sama organisasi. Ketika itu terjadi, saya harus menentukan mana yang lebih penting. Kalau dua-duanya penting, jelas saya milih kuliah. Tapi saya berusaha datang ke acara BEM walau telat,” ungkapnya. ”BEM memang mengurus banyak waktu. Tapi, saya *udab* janji sama ortu dan diri sendiri harus bisa *manage* waktu sebaik mungkin. Aktif di organisasi dengan IPK tinggi itu hal yang sangat mungkin. Berorganisasi pun jangan dijadikan alasan untuk menunda kelulusan,” tandas mahasiswi yang mampu meraih IPK di atas 3.00 ini.[]

INA SALMA FEBRIANY

Dekan FSH, Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, SH, MH, MM

Belum Ada Batasan Jumlah Dosen Perempuan dan Laki-laki

Menurut data yang ada, jumlah dosen di FSH ini didominasi laki-laki. Tanggapan Anda?

Dosen yang masuk ke Fakultas Syariah dan Hukum ini pasti telah melalui serangkaian tahapan. Makanya, tak ada skala prioritas untuk laki-laki dan perempuan. Tak pernah dibatasi. Jadi, belum ada yang mengharuskan perempuan berapa persen dan laki-laki berapa persen. Jadi yang saya rasa itu semua bagian dari kenyataan yang ada di Indonesia.

Namun, apakah proses pemilihan tersebut menurut Anda berdasarkan jenis kelamin atau skill?

Tentu saja skill. Kelebihan mereka sesuai bidangnya. Tidak dari gender. Jadi *nggak* ada pikiran harus laki-laki dan perempuan.

Pernahkah FSH dipimpin oleh perempuan?

Belum pernah. Rektor kita juga belum pernah, kan? Tapi, kesempatan untuk perempuan memimpin selalu ada. Tidak ada diskriminasi. Kemarin perempuan juga ada yang mencalonkan diri jadi dekan FSH. Sah-sah saja. Tidak ada larangan.

Kalau untuk karyawan di sini?

Jelas, ada laki-laki dan perempuan. Jadi, kalau memorsatukan jenis kelamin seperti terlalu memaksakan. Sedangkan setiap orang, baik laki-laki dan perempuan, pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Menurut Anda, bagaimana kompetensi dosen FSH?

Saya kira baik laki-laki maupun perempuan relatif sama. Artinya, dosen laki-laki yang menonjol ada, yang perempuan juga ada. Semua ahli dalam bidangnya masing-masing. Wewenang pengangkatan kan ada di Kementerian Agama dan atasan kita, jadi kita bertindak hanya sebagai *user*. Paling kita mengusulkan kekurangan dosen bidang ini, karena

kita membutuhkan, kita ambil tanpa melihat laki-laki atau perempuan.

Adakah penyesuaian matakuliah untuk laki-laki dan perempuan?

Ya, kalau matakuliah dengan mahasiswa ada. Misalnya, fikih ibadah. Matakuliah tersebut kita sediakan dua dosen. Dosen laki-laki untuk mahasiswa dan dosen perempuan untuk mahasiswi. Sebab, ada beberapa materi yang lebih tepat disampaikan dosen laki-laki untuk mahasiswa, dan sebaliknya. Misalnya materi khutbah jumat, jika yang memberi kuliah perempuan, tentu kurang tepat karena ia tidak mempraktikkannya. Begitu pun dengan masalah haid. Jika dosen laki-laki yang memberikan materi, tentu tidak tepat karena ia tidak mengalami meski tak menutup kemungkinan ia cukup paham masalah kewanitaan. Intinya, ada penyesuaian.

Selain fikih ibadah?

Ada lagi beberapa matakuliah gender dan diampu oleh dosen perempuan. Tapi karena jumlah dosen perempuan terbatas, matakuliahnya pun hanya sedikit.

Terkait mahasiswa baru, Prodi Perbankan Syariah kembali menjadi jurusan dengan peminat tertinggi. Tanggapan Anda?

Sebetulnya, kuota sudah kami minta tidak terlalu banyak. Tapi kok justru melebihi kuota yang sudah disepakati. Akibatnya, kursi berkurang, kelas berkurang. Siapa yang mau tanggung jawab jika sudah seperti ini? Artinya, terlalu dipaksakan. Konsekuensinya rasio dosen yang kurang sehat. Idealnya kita menerapkan sistem 1:24. Satu dosen mengampu 24 mahasiswa, itu jika hanya dosen tetap. Jika ditambah dengan dosen tidak tetap, menjadi 1:13. Namun, karena membludaknya mahasiswa baru Prodi PS, keputusan sistem tersebut belum pasti karena masih dalam proses.[]

>> Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Bukan Soal Angka, tapi Soal Perspektif dan Keberpihakan

Saat wawasan gender menjadi isu penting, Fidikom merespon aktif sejak awal. Dua program studi; Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan Konsentrasi Kesejahteraan Sosial (Kessos), memiliki matakuliah gender, sementara program studi lain mengintegrasikannya. Ketua Prodi BPI, PMI, Konsentrasi Jurnalistik, Kesejahteraan Sosial, kasubag Umum dan Akademik adalah jabatan yang diduduki perempuan di fakultas ini.

PEREMPUAN TIDAK LAGI memiliki peran yang minim di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidikom). Stereotip perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, setidaknya mulai bergeser. Sebab, perempuan sedikit demi sedikit mulai dipercaya untuk menduduki jabatan penting di fakultas ini. Sebut saja, ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), dan Konsentrasi Jurnalistik memiliki figur pemimpin perempuan. Selain itu, dua Kasubag yaitu umum dan akademik juga berasal dari perempuan.

“Siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan punya peluang yang sama untuk bisa memimpin di fakultas ini. Tidak ada kebijakan untuk memimpin jabatan tertentu harus laki-laki atau harus perempuan. Sebab, jika seperti itu, maka sudah melanggar prinsip gender itu sendiri. Apapun jabatannya harus diraih dengan prestasi dan kinerja yang baik,” Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fidikom, Drs Study Rizal LK, MAG.

Perempuan di Fidikom sudah menyadari untuk berperan banyak di fakultas. Fakultas sendiri, sudah membuka kesempatan untuk perempuan bisa memimpin di semua jajaran. Mereka sudah berani mengatakan ingin menjadi anggota senat, menjadi ketua prodi, ataupun mengajukan diri sebagai pembantu dekan.

Menurut Study, Fidikom cukup kondusif untuk terciptanya persaingan sehat, karena memang peluangnya 50:50. Hanya saja, harus ada keberanian dari perempuan untuk menunjukkan kemampuan dan keinginan.

Misalnya saja pada pemilihan dekan yang lalu, ada dari dosen perempuan yang ikut mencalonkan diri. Demikian juga untuk jabatan pembantu dekan yang kesempatannya terbuka untuk siapa saja. Sayangnya, hanya pada posisi pembantu dekan bidang administrasi umum saja, ada perempuan yang mencalonkan diri. Meski belum ada perempuan yang terpilih, ini menandakan ada kompetisi yang sehat. Ini mengapa komposisi di dekanat Fidikom belum ada pem-



puan.

“Belum adanya perempuan di pucuk pemimpin fakultas karena mungkin pemilih belum melihat ada figur perempuan yang pas dan cocok untuk memimpin fakultas ini. Pemilih perempuan juga rasional, kalau memilih berdasarkan sama-sama perempuan, pasti kandidat perempuan yang terpilih, tapi ternyata yang terpilih bukan perempuan. Ini hanya soal waktu, mungkin 4 tahun ke depan perempuan akan menjadi yang terbaik di fakultas. Sekarang sudah mulai kelihatan semangat dari perempuan untuk mengembangkan fakultas,” ungkapnya.

Kesempatan yang sama, imbuh Study, tidak hanya diberikan untuk menduduki jabatan tertentu, tapi juga kesempatan untuk masuk perguruan tinggi. Hal ini terlihat, misalnya pada kebijakan penerimaan mahasiswa baru, jika jumlah mahasiswa yang dibutuhkan suatu sebuah program studi 40 orang, maka komposisinya 20 orang perempuan dan 20 orang laki-laki. Itu sudah menjadi kebijakan di Fidikom.

Semangat kesetaraan gender ini dimulai dari pertemuan rektor se-Indonesia tentang betapa pentingnya wawasan gender ditanamkan di perguruan tinggi. Kemudian semangat ini ditangkap Kementerian Agama pada saat itu untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk maju dan memasukkan gender ke dalam matakuliah di prodi-prodi yang ada di UIN.

Dalam statuta Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diharuskan bagi perguruan tinggi untuk memasukkan gender ke dalam kurikulum. Memang yang diperdebatkan itu, apakah berbentuk matakuliah, atau muatan-muatan gender dimasukkan ke dalam matakuliah yang lain (integrasi).

Fidikom termasuk fakultas yang responsif dan lebih dahulu mengimplementasikan *gender mainstreaming* ini. Untuk Program Studi PMI dan Kessos, misalnya, gender memiliki matakuliah sendiri, yang bernama “Pengantar Studi Gender” dan “Gender dalam Pembangunan”. Namun, untuk program studi lain yang tidak bersentuhan langsung, integrasi gender dalam matakuliah pun dilakukan. Misalnya, *civic education* berprespektif gender dan fikih berprespektif gender.

Tujuan dari *gender mainstreaming* sendiri tidak lain untuk mendorong agar perempuan lebih ke depan. Sebab, perempuan punya hak yang sama dalam membangun bangsa, dalam mengembangkan profesi, ataupun berkarier

di suatu jabatan yang tidak hanya milik laki-laki. Ini juga menandakan bahwa ternyata wanita khususnya di Indonesia walaupun sudah mendapatkan peran yang banyak, tapi belum memadai dibandingkan posisi, kedudukan dan kajian akademik yang didapatkan laki-laki. Maka ada yang mengatakan perempuan masih terpinggirkan.

Menurut salah satu pengajar matakuliah gender, Dra Asyriati Jamil M.Hum, matakuliah gender sudah masuk di silabus Prodi PMI sejak Tahun Akademik 2004/2005. Baik dosen-dosen yang mengajar matakuliah gender spesifik maupun yang mengintegrasikan gender ke dalam matakuliah yang diampu, keduanya sudah mengikuti *workshop* yang diadakan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta.

“Ada yang sifatnya integrasi, ada yang memang berbentuk matakuliah, itu sesuai dengan kebutuhan program studi sendiri. Khususnya ilmu-ilmu sosial, selama ini matakuliah yang berkaitan dengan relasi hubungan antar manusia pasti memasukkan muatan gender. Saya sendiri mendorong SK



Rektor untuk diberlakukannya *gender mainstreaming*. Paling tidak semua matakuliah berintegrasi gender. Persoalannya sejauh mana dosen-dosen memahami itu. Bagaimana ini bisa terus ada dan terpantau, harus ada kebijakan dari atas,” jelasnya yang juga pernah menjadi sekretaris PSW.

Dalam pemikirannya, persoalan gender bukan persoalan yang sederhana. Persoalannya bukan pada persoalan kuantitatif, bukan masalah angka. Tapi, berapa banyak dosen dan pejabat universitas yang punya perspektif bahwa perempuan harus diikutsertakan dalam mengambil kebijakan.

Ketika ditanya, apakah ada bias di Fidikom, menurut-

nya ini problem yang tidak akan habis. Resistensi terhadap gender pasti ada, karena bicara gender juga tidak terlepas dari urusan politik, urusan pengambilan keputusan.

“Kalau di UIN, siapa saja bisa jadi doktor, bisa jadi profesor. Mungkin kesempatan untuk *leadership*nya yang harus ditingkatkan karena di UIN keterlibatan perempuan belum cukup banyak. Tapi saya percaya selama kapasitas, potensi diri, intelektual perempuan baik, lalu perempuan bisa menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya memerlukan maskulinitas, tapi juga femininitas harusnya kedua-duanya bisa masuk dalam karakter kepemimpinan,” ungkapnya.

Perspektif gender yang diimplementasikan di perguruan tinggi, terutama yang diajarkan kepada mahasiswanya tentu punya pengaruh nantinya terhadap lingkungan. Karena, mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan. Mereka yang akan memimpin lingkungannya saat mereka sudah lulus dari perguruan tinggi. Ternyata, tidak sedikit mahasiswa

Fidikom yang sudah aktif di lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbasis gender. Mereka proaktif untuk terlibat dalam penguatan gender untuk dirinya. Sementara di tingkat organisasi mahasiswa dengan adanya beberapa figur pemimpin BEM jurusan maupun fakultas dari kalangan perempuan, ini mengandaikan bahwa perempuan juga punya kesempatan yang sama, untuk bisa jadi pemimpin di kalangan mahasiswa.

Yang menarik lagi, kalau dulu yang menginginkan dan meminta beasiswa kebanyakan laki-laki, karena mereka berani mengatakan, ternyata sekarang lebih banyak perempuan yang mengajukan diri untuk mendapatkan beasiswa.

Sebenarnya jika dilihat dari tingkat mahasiswa, wisudawan terbaik lebih banyak dari perempuan, baik di tingkat jurusan maupun tingkat fakultas. Ini menyatakan dari secara akademis perempuan mampu dan tidak kalah dari laki-laki.[]

ELLY AFRIANI

Dekan Fidikom, Dr Arief Subhan, MA Gender itu Masalah Peluang

Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan gender?

Gender itu perbedaan jenis kelamin, yang kemudian perbedaan tersebut berpengaruh pada perbedaan peran yang sifatnya kodrat maupun sosial budaya. Yang bersifat kodrat misalnya perempuan melahirkan. Sedangkan yang bersifat sosial budaya sebenarnya konstruksi dari lingkungan. Misalnya, perempuan harus di dapur, perempuan harus patuh kepada suami, perempuan tidak pantas jadi pemimpin. Itu semua konstruksi budaya, tidak sepenuhnya benar, makanya ada usaha-usaha penyadaran seperti yang disebut *gender mainstreaming*, bahwa perempuan tidak lagi dibatasi dengan batasan tradisional. Ide itu sudah lama disuarakan UIN, jadi bukan ide baru.

Apa tanggapan Anda tentang jumlah PNS di Fidikom yang lebih banyak laki-laki ?

Data itu tidak menunjukkan apapun, kecuali menunjukkan satu lebih banyak dari yang lain. Utamanya dari *gender mainstreaming* itu soal kesempatan yang sama. Salah satunya kesempatan untuk menduduki jabatan tertentu, baik itu menjadi dekan, pembantu dekan, maupun ketua prodi, terlepas dari jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan.

Di fakultas ini dua perempuan menjadi kasubag umum dan akademik. Banyak doktor perempuan dan master perempuan, tapi jangan dibandingkan jumlah yang perempuan dan laki-laki. Gender itu persoalannya ini ada peluang, bisa tidak wanita mengakses peluang itu. Ada yang meng-

halang-halangi tidak, kalau tidak ada upaya untuk menghalang-halangi. Itu sudah termasuk *gender mainstreaming*.

Bagaimana dengan jumlah gurubesar perempuan yang sedikit sekali dibandingkan dengan gurubesar laki-laki?

Yang terpenting tidak ada usaha untuk menghalang-halangi agar perempuan menjadi gurubesar, kalau ada itu akan jadi problem. Kalau tidak ada ya tidak jadi masalah. Kesempatan itu terbuka untuk siapa saja. Jadi jangan hanya karena dia perempuan harus jadi gurubesar, jangan hanya karena dia perempuan harus jadi dekan. Jangan dipaksakan. Harus ada kapasitas dan dukungan juga.

Apakah ada bias gender di fakultas ini?

Tidak ada kebijakan yang bias gender di fakultas. Bias gender itu tidak ada di sini, bisa dilihat ada dosen perempuan, ada dosen laki-laki. Bahkan mayoritas ketua prodi perempuan. Jika memang pada saat pemilihan dekan kandidat perempuan terpilih, bisa fakultas ini dipimpin perempuan. Begitu juga dengan posisi yang lainnya. Mereka yang menduduki jabatan dekan, pembantu dekan, ketua prodi, merupakan pilihan dari para pemilih dan itu tidak ada paksaan. Perempuan dicalonkan, diberikan kesempatan yang sama untuk maju. Itu *gender mainstreaming*.

Apakah ada matakuliah tentang gender di fakultas ini?

Ada matakuliah gender di fakultas ini. Untuk Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan Konsentrasi Kesejahteraan Sosial (Kessos), ada matakuliah gender yang berdiri sendiri. Ini sesuai dengan kebutuhan prodi tersebut. Sedangkan untuk prodi lain, sifatnya muatan gender yang diintegrasikan dengan matakuliah lain. Misalnya fikih berperspektif gender, hadis berperspektif, dan sebagainya.[]

>> Fakultas Dirasat Islamiyah

Dipengaruhi Faktor Sosial dan Budaya

Agama sering dijadikan dalih ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan. Ajaran Islam dalam al-Quran tidak ada diskriminasi. Namun, orang yang memahami ayat al-Quran dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya.

UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta, khususnya Fakultas Dirasah Islamiyah memberikan peluang yang sama kepada semua dosen dan staf, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bisa berkompetisi menjadi yang terbaik.

Mengenai jumlah perempuan di FDI lebih sedikit daripada laki-laki, menurut Dekan FDI, Prof Dr Abuddin Nata, MA, sudah menjadi fenomena umum. Tidak ada peraturan yang dirancang untuk tidak memberi kesempatan kepada perempuan. Poinnya cuma satu; perempuan harus bersiap diri untuk meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan keterampilan, sehingga pada saat bersaing bisa

menjadi pemenang.

Abuddin, saat ditemui di kantornya, Jumat 25 September, tidak sependapat jika agama mendiskriminasi posisi perempuan. Menurutnya, agama dalam al-Quran memberikan kesempatan yang sama baik kepada perempuan maupun laki-laki. Namun yang sering terjadi banyak pemahaman kurang tepat terhadap Al-Quran .

Jadi, harus dibedakan antara al-Quran dan pemahamannya. Agama dalam arti yang sudah membudaya, yang dipahami. Allah sendiri dalam al-Quran memberi kesempatan baik kepada laki-laki maupun perempuan dalam semua bidang.





Namun, al-Quran memiliki ukuran sesuai dengan anatomi, psikologis, dan biologis.

“Misalnya untuk menjadi hakim yang memutuskan perkara-perkara, mungkin perempuan tidak tega secara psikologisnya. Maka di dalam kehakiman ada wilayah yang pas bagi perempuan. Jadi perempuan berperan juga dalam kehakiman, tapi ada penyesuaian-penyesuaian. Di situ al-Quran bicara,” jelas Abudin.

Abuddin merujuk kepada hadis Nabi Muhammad yang sering disalahpahami. Ketika pemilihan presiden, yang salah satu kandidatnya perempuan, kerap kali ada hadis nabi yang sering dijadikan dasar untuk mendiskriminasi kaum perempuan. Bahwa, tidak akan berbahagia suatu kaum yang dipimpin perempuan. Namun, hadis tersebut harus dilihat konteksnya pada saat itu.

Dahulu pada masa Nabi Muhammad, ada perebutan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di Persia. Nabi saat itu tahu ada seorang wanita yang karakternya tidak baik, namun dipaksakan untuk menjadi pemimpin. Tapi, kenyataannya hadis tersebut sering dipakai untuk mengeneralisir, padahal konteksnya berbeda.

Di fakultas lain seperti di FITK dan FKIK, jumlah perempuan justru lebih banyak. Itu karena sifat dan karakter pekerjaan bahwa selama ini wilayah pekerjaan di

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan lebih diminati perempuan. Sama halnya di bidang pendidikan lebih banyak guru perempuan. Karakter dan spesifikasi pekerjaan yang berimplikasi pada sumberdaya manusianya. “Untuk menjadi perawat itu kan umumnya perempuan. Jadi yang harus ditumbuhkan kreativitas perempuan. Kesempatannya semua sama. Sebab itu, perempuan harus bisa berkompetisi dengan kesempatan yang sudah terbuka ini,” ungkapnya.

Bukan karena faktor gender yang menyebabkan tidak banyak perempuan yang menduduki jabatan penting di fakultas. Tapi faktor lain, seperti pendidikan dan kemampuan. Di UIN sendiri, untuk mengangkat seorang pegawai, harus berdasarkan analisis Daftar Urutan Kerja dan Kepangkatan. Tentu dinilai berdasarkan kepribadian, loyalitas, profesionalitas, disiplin, karena bagaimana pun ketika mengangkat karyawan untuk jabatan tertentu, tentu diharapkan kinerja yang lebih baik untuk lembaga itu.

“Itu semua dibahas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang melibatkan seluruh pimpinan fakultas, biro yang terkait, dan juga pemimpin UIN, dalam hal ini Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum,” jelas mantan Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum.

Abudin mengakui, pertimbangan yang sifatnya politis memang ada, tapi itu bukan faktor yang merupakan indikator. Itu faktor X saja yang kadang-kadang ada. Tapi secara keseluruhan lebih mengembangkan asas kompetensi dan kapabilitas. Saat ada perempuan yang memiliki kemampuan fakultas akan memanfaatkannya.

FDI, sebagaimana fakultas lain, juga mendorong semua dosen dan staf untuk kuliah lagi baik jenjang S2 dan S3, laki-laki dan perempuan sama-sama diberikan kesempatan. Namun, karena banyak factor, hanya sedikit perempuan yang menempuh pendidikan doktor.

Ditanya tentang seringnya perempuan gagal pada saat berkompetisi untuk menjadi pemimpin fakultas maupun universitas, dia menjelaskan sama sekali tidak ada rekayasa

supaya perempuan tidak jadi pemimpin. Itu semua proses dialektika, lalu dibawa ke senat fakultas atau senat universitas. Sekarang perempuan punya kesadaran, pendidikan, kemampuan, pengalaman yang harus ditingkatkan. Secara alami, mereka akan punya peran besar.

Di FDI sendiri, secara spesifik tidak ada matakuliah gender. Fakultas ini fokus pada studi-studi Islam, seperti tafsir, fikih, dan tasawuf. Namun pengintegrasian gender pada matakuliah lain itu dilakukan.

“Dalam kajian kontemporer sekarang ini ada pendekatan feminisme, pendekatan dalam studi agama yang memperhitungkan peran dan fungsi wanita. Dalam fikih itu memang substansinya ada,” tuturnya.[]

ELLY AFRIANI

Dekan FDI, Prof Dr Abuddin Nata, MA

Pertimbangkan Karakteristik Pekerjaan

Apa pendapat Anda tentang gender?

Setahu saya prinsip gender itu prinsip keseimbangan, kalau kebanyakan laki-laki tidak bagus, kebanyakan perempuan juga tidak bagus. Harus diperhatikan juga spesifikasi pekerjaan. Jadi, harus mempertimbangkan karakteristik pekerjaan dihubungkan sifat dan karakteristik perempuan. Misalnya, pekerjaan yang mengandalkan fisik dan otot, seperti kuli panggul lebih cocok dikerjakan laki-laki, karena jika dikerjakan perempuan akan dilihat sebagai penyiksaan. Begitu juga di angkatan bersenjata, ada perempuannya tapi cocoknya di bagian kesehatan, keperawatan. Itu bukan diskriminasi, tapi disesuaikan dengan fitrah dan karakter pekerjaan.

Apa yang terjadi ketika perempuan menggeluti profesi yang cocoknya dilakukan laki-laki?

Kita tidak menyadari yang sifatnya subtansif dalam konteks gender perspektif masyarakat Barat. Gender dalam masyarakat Barat visinya untuk bisnis atau *commercial oriented*. Mindset dan visi seperti itulah yang kemudian mendorong laki-laki dan perempuan untuk memperebutkan peluang dengan tidak mempertimbangkan kekhususan anatomis, kekhususan biologis dan kekhususan psikologis. Saya melihat wanita-wanita di Barat itu sudah masuk dalam perangkap perbudakan konsep hedonistik. Mereka kelihatannya bebas tapi sesungguhnya sudah terpenjara oleh bentuk-bentuk pekerjaan yang sesungguhnya menjatuhkan martabat wanita itu sendiri. Misalnya, pekerjaan yang secara spesifik lebih pas dikerjakan kaum pria, tetap diker-

jakan juga oleh wanita, seperti sopir truk. Menjadi petinju, pemain bola, dan sebagainya. Rasanya tidak begitu.

Apakah ada kebijakan yang menghambat perempuan?

Di UIN khususnya FDI siapapun yang memiliki kriteria yang dibutuhkan, dengan sendirinya diberikan peluang untuk menduduki jabatan. Jadi kalau sekarang petanya masih didominasi laki-laki, itu bukan rekayasa UIN tapi dari sebuah proses. Misalnya dari segi pendidikan dibutuhkan S2 tapi ternyata perempuan yang ada cuma S1, sedangkan kandidat laki-laki S2, maka yang terpilih laki-laki. Di UIN sama sekali tidak ada usaha untuk menghambat karena faktor gender. Siapa saja memiliki kemampuan pasti bisa.

Di pasca sarjana pernah ada wakil direktur perempuan, di FITK juga ada sekarang. Kabag-kabag juga ada yang perempuan. Tapi jika jumlah sedikit, itu faktor perempuannya sendiri. UIN sifatnya hanya memanfaatkan.

Apakah ada aturan yang bias gender?

Rasanya zalim jika di FDI atau di UIN ada bias gender. Di sini ada Bu Amany, Bu Huzaimah, Bu Aida. Kalau ada yang bagus, *masak* tidak dimanfaatkan. Permasalahannya tidak ada perempuannya. Diskriminasi itu jika ada yang bagus, tapi tidak dipakai. FDI membuka kesempatan kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan untuk bisa memimpin. Tidak ada posisi tertentu yang khusus laki-laki atau perempuan. Untuk posisi dekan, contohnya, itu ada pemilihannya. Semua disurati untuk mengisi formulir siap dicalonkan atau tidak. Tidak ada perempuan yang tidak disurati. Tentu saja mereka yang disurati harus memenuhi persyaratan sesuai statuta. Misalnya golongannya minimal IV A, pangkatnya harus lektor, usianya tidak boleh lebih dari 61 tahun. Jika sudah memenuhi syarat itu, faktor selanjutnya ada kemauan atau tidak. Itu semua sama. Jika hasilnya tidak ada perempuan yang mencalonkan, pemilihan tetap harus berlangsung karena kepemimpinan tidak oleh kosong dan akan jalan terus.[]

>> Fakultas Psikologi

Perempuan Harus Miliki Kompetensi Optimal

Baik mahasiswa maupun dosen didominasi perempuan. Namun, hal tersebut tak menjadi ganjalan untuk maju sebagai fakultas yang berkualitas. Laki-laki dan perempuan mendapatkan peluang yang sama. Namun tetap, perempuan harus miliki kompetensi optimal untuk duduki posisi strategis.

TEPAT PADA SIANG hari yang cukup terik, ba'da Jumat (24/9), sekitar 150-an orang mahasiswa baru mengikuti persiapan Program Pengenalan Studi dan Almamater (Pro-pesa). Mereka duduk berjejer rapi mendengarkan instruksi dari kakak pendamping. Perkumpulan itu terbilang unik. Unik karena ternyata kuantitas mahasiswi lebih banyak dari mahasiswa.

"Hampir seluruh universitas dalam dan luar negeri yang ada Fakultas Psikologinya, 2/3nya adalah perempuan," ujar Dekan Fakultas Psikologi, Jahja Umar, PhD, Senin (27/9)

siang.

Senada dengan dekan, Pembantu Dekan Bidang Akademik FPsi, Dra. Fadhilah Suralaga, M.Psi memaparkan kuantitas mahasiswi pada FPsi. "Kita tidak tahu apakah ini kecenderungan yang ada kaitannya dengan feminis atau bukan sehingga fakultas ini banyak diminati oleh perempuan," ujarnya, Senin (27/9). Namun, tambah Fadhilah, keberadaan mahasiswa tentu juga sangat dibutuhkan. "Meski demikian (lebih banyak mahasiswi, red.), kita tetap memerlukan mahasiswa tentunya," tuturnya.





Kuantitas mahasiswi yang lebih banyak dibandingkan mahasiswa pada FPsi, rupanya juga terjadi pada jumlah dosen perempuan yang juga lebih banyak dibandingkan laki-laki. Menurut data yang dihimpun dari Manajemen Kepegawaian Fakultas Psikologi UIN Jakarta, dosen tetap pada fakultas ini berjumlah 28 orang dengan rincian laki-laki 12 orang dan perempuan 16 orang. Jenjang pendidikan hampir seluruhnya telah menamatkan S2. Jenjang S2 sebanyak 22 orang dengan rincian 8 laki-laki dan perempuan 14 orang. Terakhir, jenjang S3, untuk sementara sebanyak 4 orang yang seluruhnya laki-laki. Sekitar 10 dosen, menurut Fadhillah, sedang menempuh studi pada universitas-universitas ternama baik melalui program beasiswa maupun tidak. Sedangkan untuk dosen tidak tetap berjumlah lebih banyak, 44 orang dengan rincian 14 perempuan dan 30 laki-laki yang mayoritas telah menamatkan S2.

Sedangkan data yang diperoleh dari Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian UIN Jakarta, jumlah keseluruhan dosen dan karyawan jika dikalkulasikan dalam bentuk prosentase ialah sebagai berikut, untuk jenjang S3 berjumlah 4 orang (8,9%). S2 sebanyak 27 orang atau (60,0%). S1 7 orang (15,6%) dan SMA sebanyak 7 orang yakni (15,6%). Meski demikian, jumlah Pegawai Negeri Sipil laki-laki justru lebih sedikit dibandingkan perempuan. PNS laki-laki berjumlah 21 atau sekitar 46,7% dan perempuan berkisar 24 orang (53,3%).

Menanggapi hal tersebut, Fadhillah menuturkan lebih banyaknya dosen perempuan ketimbang laki-laki bukan didasari gender. "Tidak ada kebijakan menerima dosen melihat dari proporsional mahasiswa. Pertimbangan pene-

rimaan dosen untuk FPsi ini tetap dilihat dari kualifikasi personal," tegasnya. Kualifikasi personal tersebut, lanjut Fadhillah, dapat dicontohkan misalnya FPsi sedang membutuhkan dosen yang ahli dalam Psikologi Industri dan Organisasi (PIO), siapapun yang mengajukan diri, baik laki-laki maupun perempuan, jika kompetensinya bagus, maka akan diterima. "Artinya, pertimbangan penerimaan dosen lebih dilihat sesuai kebutuhan dan kompetensi," imbuhnya.

Dalam segi matakuliah, Fadhillah menjelaskan tidak ada matakuliah khusus untuk perempuan dan khusus untuk laki-laki. "Perbedaan matakuliah tidak ada. Namun, kalau matakuliah psikologi perkembangan, yang di dalamnya kita membahas tentang psikologi keluarga, di situlah terlihat perspektif gendernya," ujarnya. Dalam matakuliah tersebut, mahasiswa dan dosen bersama-sama menganalisa aspek-aspek psikologi laki-laki dan perempuan.

Selain dari segi matakuliah, kesetaraan gender telah tampak dari jajaran dekanat FPsi karena proporsi laki-laki dan perempuan yang sama. "Seimbang, karena Dekan dan Pudek II kita laki-laki. Sedangkan Pudek I dan III perempuan," katanya. Namun, untuk masuk ke dalam posisi yang berpengaruh dalam setiap lingkup keorganisasian, Fadhillah menganjurkan agar perempuan dapat bekerja secara optimal. "Sebetulnya, tidak ada hambatan bagi perempuan untuk maju namun sepertinya perempuan harus memiliki kompetensi yang betul-betul optimal dengan menunjukkan kinerja yang bagus untuk mengambil posisi strategis," tandasnya.[]

INA SALMA FEBRIANY



Dekan Fakultas Psikologi, Jahja Umar, Ph.D Magister Sains Psikologi Tak Hanya Mencetak Psikolog

Program Magister Sains Psikologi resmi dibuka. Apa target yang akan dicapai?

Selain program S1, saya memang berusaha keras untuk membuka Program Magister Sains Psikologi. Target yang akan dicapai adalah mencetak ilmuwan handal dalam bidang psikologi dengan menitikberatkan psikometri sebagai ciri khas magister sains psikologi UIN Jakarta.

Mengapa psikometri?

UIN Jakan kan terbilang baru dalam bidang kepsikologian. Jika kita memusatkan Psikologi Klinis, misalnya sebagai ciri khas kita, ya jelas tidak bisa, UI dan UGM sudah lebih dulu. Kita pasti tertinggal jauh sekali. Makanya dibutuhkan batu loncatan, yakni psikometri.

Magister Sains Psikologi? Bukan Magister Psikologi?

Itulah bedanya dengan universitas yang ada program magister psikologinya. Kami tidak hanya mencetak seorang psikolog. Tapi lebih dari itu, kami ingin menghasilkan seorang ilmuwan yang nantinya akan memberikan sumbangsuhnya untuk bangsa, negara dan dunia.

Adakah rencana untuk menambah peminatan lagi?

Tentu ada. Rencana jangka panjang, jika peminatnya su-

dah bertambah, kami akan buka psikologi sosial. Tapi itu nanti. Jalani dulu yang ada saat ini.

Tenaga pengajar mayoritas berasal dari luar UIN?

Ya, tentu. Mayoritas berasal dari universitas ternama misalnya UI dan UGM.

Di antara tiga peminatan, manakah program yang paling sepi peminat?

Psikometri.

Mengapa?

Susah. Jadi calon mahasiswa pada menghindari. Di mana pun, universitas yang menyediakan magister psikologi untuk peminatan psikometri pasti sepi peminat. Karena mungkin bagi mereka susah. Hitung-menghitung. Paling banyak mengambil psikologi pendidikan. Selebihnya Psikologi Industri dan Organisasi (PIO).

Harapan Anda untuk Fakultas Psikologi?

Menjadikan Fakultas Psikologi UIN menjadi salah satu fakultas berkualitas yang diperhitungkan kehebatannya, melalui ciri khas tadi, psikometri. Dengan begitu, jika kita sudah dapat mengembangkan dengan baik, universitas lain pasti banyak yang mencontoh kita.[]

>> Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Fakultas dengan Dominasi Perempuan

Lis laki-laki dan perempuan dipisahkan. Di kelas, mereka juga duduk terpisah, seperti biasanya. Akan diusahakan musala khusus perempuan. Dosen, mahasiswa, dan staf administrasi didominasi perempuan. Mahasiswa berprestasi pun berasal dari perempuan.

KETIKA MENGINJAKKAN KAKI ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) tampak terlihat tanaman yang mengelilingi air mancur di dalam lantai dasar fakultas. Tanaman itu seakan ingin bercerita tentang keindahan dan keramahan yang diperlihatkan fakultas tersebut.

Di depan taman buatan itu, mahasiswa dan mahasiswi sedang menunggu lis secara terpisah. Mereka tertib mengikuti peraturan pemisahan lis antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Mereka nyaman dan aman dengan peraturan tersebut.

FEB selama ini memang mengupayakan agar mahasiswi nyaman dan aman saat hendak kuliah maupun di saat berada di ruang publik lainnya. Mahasiswi dan mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkiprah di fakultas.

“Contoh kecil, kami menerapkan memisahkan antara lis laki-laki dan perempuan, supaya perempuan merasa aman dan tidak berdesak-desakan dengan laki-laki,” ungkap Pembantu Dekan Bidang Administrasi FEB, Indo Yama Nasaruddin, SE.MAB.

Pemisahan tersebut, kata Indo Yama, sebagai bentuk





dari perhatian FEB terhadap hak-hak orang-orang yang menghuni FEB, baik laki-laki dan perempuan. “FEB tidak hanya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki,” jelas Indo Yama.

Memang, ungkap Indo Yama, di FEB perlu adanya fasilitas yang mengutamakan nyaman bagi perempuan, sehingga perempuan dapat merasa terlindungi, karena privasi yang dimiliki oleh perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Misalnya dari segi aurat, aurat perempuan mulai dari rambut sampai ujung kaki, sedangkan laki-laki hanya dari pusar sampai lutut. FEB juga akan berupaya menyediakan musala khusus bagi perempuan. Dengan begitu, ungkap Indo Yama, mahasiswi dapat melaksanakan ibadahnya dengan khusyu’ dan leluasa tanpa harus ada lawan jenis yang membatasi keleluasaan.

Selain itu, yang sudah menjadi kebiasaan pemisahan antara mahasiswa dan mahasiswi, yaitu di ruang kelas, tempat duduk laki-laki dan perempuan sudah terpisah secara teratur. Hal itu, sudah menjadi kebiasaan bagi mahasiswa dan mahasiswi. Mereka berinisiatif untuk memisahkan diri satu sama lain.

Secara kuantitas, pegawai atau karyawan perempuan FEB lebih banyak dibandingkan pegawai laki-laki; 55% perempuan dan 45% laki-laki. Sedangkan dari segi dosen/pengajar, perbandingan mereka cukup jauh: 80% dosen perempuan dan 20% dosen laki-laki. “Dosen perempuan sangat mayoritas,” ungkap Indo Yama. Adapun perbandingan mahasiswa FEB berkisar antara 60% mahasiswa perempuan dan 40% mahasiswa laki-laki. Hal itu terjadi, ungkap Indo Yama, disebabkan adanya Jurusan Akutansi yang

banyak diminati perempuan.

Sedangkan dari staf bagian keuangan, kebanyakan perempuan. Hampir semua masalah yang berkaitan dengan uang ditangani perempuan. “Ada dua orang saja. Sedangkan kabag dan kasubagnya perempuan. Selain itu, biasanya perempuan senang sekali mengatur-ngatur keuangan dan lebih teliti dalam merinci. Makanya banyak mahasiswi yang mendaftarkan diri untuk masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini,” tutur Indo Yama.

Dalam bidang organisasi, FEB memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi perempuan; baik dosen perempuan, pegawai perempuan, dan mahasiswi untuk pengembangan diri dan melakukan kompetisi dengan laki-laki dalam meraih prestasi dan jabatan strategis dalam fakultas. “Hal ini sudah dilakukan, dan terbukti dari terpilihnya Ketua Jurusan Akutansi, yang perempuan. Itu tandanya kami memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkompetisi,” ungkap Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, Herni Ali.

Herni dengan tegas menjelaskan, tidak ada peraturan di FEB yang mengatur jabatan strategis di fakultas hanya bisa diduduki laki-laki saja, misalnya. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan posisi tersebut sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Meski ia juga tidak menapikkan bahwa periode jabatan di dekanat saat ini didominasi oleh laki-laki. “Dulu, di fakultas ini, pembantu dekananya ada yang perempuan,” ungkap Herni.

Herni juga menuturkan, saat ini, perempuan sudah tidak ditempatkan dalam lingkup yang subordinat. Perem-

puan sudah bisa melakukan kiprahnya sebagai dirinya sendiri dan dengan kemampuannya. “Perempuan sudah tidak dipandang sebelah mata lagi. Kita lihat contohnya, banyak ekonom perempuan yang sangat berpengaruh dan luar biasa kiprahnya di dunia, contoh di Indonesia, seperti Sri Mulyani,” katanya.

Karenanya, ungkap Herni, tak ada lagi ungkapan bahwa perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Saat ini kesempatan terbuka seluas-luasnya bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam berbagai ranah. Yang menjadi masalah, ungkap Herni, perempuan berminat tidak dalam mengambil kesempatan tersebut. Terutama kesempatan yang diberikan FEB seluas-luasnya bagi perempuan.

Di FEB, mahasiswi sudah bisa membuktikan kemampuan dan kualitasnya. Menurut Indo Yama, dari tiga semes-

ter, wisudawan terbaik yang mendapatkan penghargaan adalah perempuan. “Mungkin perempuan mempunyai semangat belajar yang tinggi dan lebih mudah diatur dibandingkan laki-laki,” ungkapnya kalem.

Selain itu, dari segi kelulusan, jumlah wisudawan setiap tahunnya di FEB yang banyak dari perempuan. “Misalnya satu orang mahasiswa banding lima orang mahasiswi. Saya tidak tahu apa penyebabnya, apakah mungkin karena perempuan lebih serius dalam belajar, sedangkan laki-laki agak santai dalam belajar,” tuturnya.

Saat ini, dari segi pemberian beasiswa, ungkap Indo Yama, FEB juga sudah melihat dari aspek gender, misalnya berapa jumlah laki-laki dan perempuan yang mendapatkan beasiswa. “Jadi semuanya bisa mendapatkan kesempatan beasiswa yang sama, yang tidak didominasi oleh mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan saja,” ungkapnya.[]

IRADATUL AINI

Pudek Kemahasiswaan FEB, Herni Ali HT, SE, MM

Mahasiswi Tidak Boleh Memakai Celana dan Pakaian Ketat

Bagaimana wacana kesetaraan gender di Fakultas Ekonomi dan Bisnis?

Saya ingin menyorotinya dari segi kode etik berpakaian terlebih dahulu. Dalam kode etik berpakaian mahasiswa sudah diatur berdasarkan SK. Rektor. Mahasiswa diberitahukan bagaimana berbusana yang baik dan rapi dalam lingkungan kampus. Misalnya mahasiswi tidak boleh memakai celana dan pakaian yang ketat, yang memperlihatkan bentuk tubuhnya dan mahasiswa tidak boleh memakai celana jins yang robek serta rambut gondrong. Contoh foto berpakaian yang baik dan rapi sudah terpampang di samping pintu masuk fakultas.

Menurut saya, kode etik berpakaian yang disyaratkan oleh universitas sangatlah menguntungkan bagi laki-laki dan perempuan. Bagi mahasiswa, dengan berpakaian rapi, identitas mahasiswa sebagai orang yang terpelajar terlihat jelas. Dan bagi mahasiswi, selain terlihat sebagai perempuan terhormat dan muslimah, ia terhindar dari kejahatan yang ingin menguntitnya. Makanya saya berulang-ulang supaya kode etik berpakaian yang sudah dirancang benar-benar diterapkan sehingga mahasiswa dan mahasiswi di FEB ini merasakan keamanan dan kenyamanan, dan terutama benar-benar menampakkan identitasnya sebagai mahasiswa di universitas Islam.

Dari segi kesempatan, FEB memberikan peluang yang selebar-lebarnya bagi perempuan dan laki-laki untuk berkiprah bersama. Tidak ada yang dibeda-bedakan dan diklasifikasikan. Selama mereka berada di FEB, mereka

memiliki hak yang sama untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuannya.

Apakah di FEB ada keistimewaan khusus bagi perempuan untuk menduduki suatu jabatan?

Tidak ada. Tidak ada keistimewaan dan perlakuan khusus bagi perempuan. Jika di DPR ada wacana tentang kuota 30% bagi perempuan, di FEB tidak ada pengkhususan. Semuanya terlihat alami. Pegawai, dosen, mahasiswa laki-laki dan perempuan silahkan berkompetisi secara sehat dan wajar untuk menyalurkan kreativitasnya. Jika ia mempunyai kapabilitas untuk memimpin, ia yang akan memimpin tidak peduli laki-laki dan perempuan. Silahkan saja. Sekali lagi FEB memberikan peluang yang besar untuk berkiprah. Ya, kecuali dalam menyakut masalah imam salah. Sudah jelas, imam shalatnya harus laki-laki dan tidak mungkin perempuan.

Bagaimana kuantitas dan kualitas gender di FEB ini?

Secara kuantitas, perempuan lebih banyak di FEB, baik dari segi mahasiswa, pegawai dan dosennya. Dari segi kualitasnya juga, perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Banyak perempuan di FEB ini yang menduduki jabatan strategis. Seperti kabag TU dijabat perempuan, Kasubagnya juga perempuan, dan ketika pemilihan ketua Prodi Akuntansi dijabat oleh perempuan. Itu menandakan bahwa perempuan dari segi intelektualitasnya dan kemampuannya sama dan setara dengan laki-laki.[]

>> Fakultas Sains dan Teknologi

Bukan Diskriminasi Perempuan terhadap Laki-laki

Enam prodi dipimpin perempuan. Ada calon dekan dan pembantu dekan dari perempuan, tapi tak terpilih. Hanya dua orang perempuan yang menjadi doktor. Ada upaya pemisahan perempuan dan laki-laki di dalam lift, tapi tak berjalan.

DALAM SEMUA LINI, isu tentang gender selalu menghangapi. Terjadi perbenturan antara kekuasaan laki-laki dan perempuan. Ada yang beranggapan, laki-laki harus menjadi pemimpin bagi perempuan, tapi dalam zaman yang modern ini, wacana tersebut dibantah dan ditolak, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, fakultas yang baru berdiri delapan tahun yang lalu, menobatkan diri sebagai fakultas yang sadar akan gender. Hal itu dibuktikan, dari salah satu bagian organisasi di fakultas tersebut. Di ruan-

gan yang tertera nama ruang kabag Tata Usaha dan kasubag Administrasi dan Kepegawaian, misalnya, terlihat ruangan tersebut keberadaan perempuan dan laki-laki sebanding di dalamnya. Menurut Pembantu dekan Bidang Admimistrasi Umum itu, Ir. Mudatsir Najamuddin Masykur Halim, M.M, di bagian Tata Usaha tersebut, terdapat tiga kasubag, dua orang perempuan dan satu orang laki-laki, dan staf-staf yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

“Di Fakultas Sains dan Teknologi ini tidak ada diskriminasi gender. Semuanya sama. Perempuan dan laki-laki boleh menjabat apa saja sesuai dengan kemampuannya,”





ungkap Pudek II tersebut. Bahkan, menurutnya, di FST ini jumlah karyawan perempuan yang menduduki posisi strategis lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Mudatsir menjelaskan, pada level program studi reguler dari tujuh program studi, enam di antaranya dipimpin oleh perempuan. Dari Program Studi Biologi, Prodi Kimia, dan Prodi Matematika, ketua dan sekretarisnya perempuan, Prodi Agribisnis, ketua perempuan, dan Prodi Internasional ketua program studinya perempuan. Hal itu terjadi, ungkap Mudatsir, bukanlah dikarenakan persoalan gender tetapi dikarenakan kemampuan untuk memimpin. "Kalau perempuan lebih mampu untuk memimpin, kenapa tidak?" tuturnya.

Memang, ungkap Mudatsir, kepemimpinan yang belum dimasuki oleh perempuan adalah di bagian dekanat. Tetapi Mudatsir percaya, kalau suatu saat nanti ada yang sesuai dan mampu untuk menjabat sebagai dekan dan pembantu dekan tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa menjabat di bagian tersebut. "Kesempatan pasti selalu ada," ungkapnya.

"Sewaktu pemilihan dekan dan pembantu dekan, memang ada perempuan yang mencalonkan diri. Tapi ternyata tidak terpilih. Saya tidak tahu juga kenapa tidak terpilih padahal di FST ini pemilih terbanyak adalah perempuan," tuturnya.

Senada dengan Mudatsir, Agus Salim, Pembantu Dekan Bidang Akademik, mengungkapkan, di FST, perempuan

dan laki-laki ditempatkan pada level yang sama dalam hak dan kesempatan. Sedangkan dari segi jabatan, hal itu tergantung pada kemampuan masing-masing. "Tidak ada di FST yang mengatur, laki-laki harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan perempuan yang menjadi bawahannya," tegasnya.

Agus juga menyatakan, bahwa sebenarnya jabatan di Fakultas Sains dan Teknologi didominasi perempuan. Tetapi Agus mengungkapkan hal itu bukan karena adanya diskriminasi perempuan terhadap laki-laki. "Kalau laki-lakinya tidak mampu untuk menjabat, ya tidak akan diangkat," katanya.

Ia juga mencontohkan, tujuh program studi reguler yang sebagian besar dijabat oleh perempuan, menandakan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan untuk memimpin. "Di sini tidak ada istilah diatur, siapa yang punya kapasitas, kapabilitas dan potensi untuk itu dialah yang akan terpilih," ungkapnya.

Mudatsir juga menambahkan, "Saya kira tidak ada masalah gender di situ, dan yang dilihat tentu adalah masalah perempuan. Alhamdulillah di Fakultas Sains dan Teknologi tidak ada yang bias gender. Kalau ada perbedaan, di mana-mana perbedaan selalu ada," ungkapnya.

Sedangkan dari segi fasilitas, menurut Mudatsir, pernah diwacanakan di Fakultas Sains dan Teknologi untuk dipisahkan antara lift laki-laki dan perempuan. "Saya sudah

pernah menyampaikan hal itu, ada baiknya dipisah antara lift perempuan dan laki-laki. Tapi masalahnya liftnya terlalu kecil. Dan apalagi tanggung jawab liftnya dari pihak rektorat. Tapi yang jelas saya sudah membicarakannya,” katanya.

Memang, secara struktur bangunan di Fakultas Sains dan Teknologi tidak ada ruangan khusus yang bisa ditempati secara khusus oleh perempuan. Tetapi hal itu, ungkap Mudatsir, tidak lantas perempuan merasa dirugikan dengan keadaan bangunan tersebut. “Kami juga sudah membuat ruangan-ruangan nyaman untuk karyawan yang sebagian besar akan ditempati oleh karyawan perempuan.”

Untuk masalah musala, papar Mudatsir, sudah dibuat batas pemisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ungkapnya, ia berencana untuk memperbaiki sekat pemisah tersebut. “Sekat pemisahannya tidak perlu tinggi-tinggi sampai menutup semua badan tapi ingin dibuat setengah badan saja, supaya kalau ada acara kultum atau diskusi bisa dinikmati oleh perempuan dan laki-laki,” tuturnya.

Di ruang kelas, mahasiswa laki-laki dan perempuan sudah mengambil posisi sendiri untuk memisahkan diri. Sehingga tidak perlu disuruh. “Tata tertib kenyamanan bagi perempuan dan laki-laki yang mencerminkan keislaman sudah dilakukan. Sedangkan yang belum adalah peraturan berpakaian rapi bagi mahasiswa dan mahasiswi. Masih banyak mahasiswi yang berpakaian lekuk tubuhnya kelihatan, padahal kode etik berpakaian sudah ada. Padahal, kode etik berpakaian tersebut menempatkan posisi wanita pada posisi yang di atas,” tuturnya.

Mudatsir juga mengungkapkan, dari segi pendidikan, di Fakultas Sains dan Teknologi, ada dua orang perempuan yang menjadi doktor. Tetapi hal itu bukan berarti kesempatan pendidikan perempuan terbatas, “Masih banyak calon doktor FST. Harapan saya, kesadaran gender akan terus dikembangkan. Di FST akan selalu ada kesempatan kepada semua untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya,” tuturnya.[]

IRADATUL AINI

Pudek Bidang Akademik FST, Dr. Agus Salim, M.Si.

Menunggu Arahan dari Pihak Rektorat

Bagaimana wacana gender di Fakultas Sains dan Teknologi?

Kalau wacana gender di Fakultas Sains dan Teknologi (FST), dari segi kurikulum masih belum ada. Tapi kalau dari posisi jabatan, hampir 50%-50% posisi perempuan dan laki-laki. Baik itu di level prodi dan di level lembaga struktural. Bahkan, di level prodi, dari tujuh prodi, enam prodinya dipimpin oleh perempuan dengan sekretaris prodinya yang juga hampir perempuan semua. Sepertinya di FST ini yang dominan adalah perempuan. Baik dari dosen-dosenya ataupun karyawannya.

Apakah ada program khusus untuk mewacanakan gender?

Program khusus untuk mewacanakan gender dalam seminar formal itu masih belum ada, karena FST berbeda dengan fakultas agama. Tapi meskipun wacana dalam bentuk program dan kurikulum belum ada, pada aplikasi kesetaraan gender sudah kita lakukan. Di FST, semua yang bekerja tidak melihat jenis kelamin.

Soal wacana gender dimasukkahkan ke dalam kurikulum, kita menunggu arahan dari pusat (pihak rektorat, red) dan harus mengacu pada juklak terdahulu dan tergantung pada asosiasi prodi. Saya secara pribadi, setuju-setuju saja jika wacana gender dimasukkan menjadi kurikulum, baik intra ataupun ekstra. Karena memang kita perlu pengetahuan tentang gender supaya tidak kebablasan. Kami juga ingin menjembatani antar-dosen yang berbeda pemikiran dan pemahamannya tentang makna gender.

Sekali lagi, saya pribadi mendukung keterlibatan perempuan, tapi memang hanya sebatas kesempatan studi dan kepemimpinan. Kalau soal kurikulum yang berwawang gender, kita masih menunggu pihak rektorat dan SK Mendiknas dan asosiasi prodi masing-masing. Karena prodi itu berkiblat pada asosiasinya. Bila prodi itu berbeda kurikulumnya, maka prodi itu tidak diakui asosiasi. Tapi kalau asosiasinya mewajibkan, mau tidak mau prodinya harus memasukkan. Jadi intinya tergantung asosiasi

Apakah kinerja pegawai di FST dipengaruhi gender?

Tidak. Selama tidak terikat kontrak, kesempatan antara perempuan dan laki-laki di dalam hukum FST adalah hal yang wajib. Karyawan yang laki-laki dan perempuan diperbolehkan untuk aktif dan berkiprah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tidak ada batasan bagi suatu kaum untuk melakukan yang terbaik bagi FST ini. Yang terpenting dalam istilah gendernya, tidak ada istilah diskriminasi di dalam tubuh FST, baik perempuan ataupun laki-laki. Mereka mempunyai hak dan kesempatan yang sama.

Apakah di FST ada karya-karya tentang gender?

Ada karya-karya tentang perempuan yang dihasilkan lewat penelitian. Misalnya, tentang peran perempuan dalam pengolahan limbah rumah tangga dan peran perempuan dalam penghijauan. Saya sendiri dulu suka dilibatkan di dalam pemberi materi tentang peran gender.[]

⇒ Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Gender No, Kompetensi Yes!

Umumnya fakultas kedokteran, FKIK UIN Jakarta didominasi kaum hawa. Mahasiswa jauh lebih banyak daripada mahasiswa. Pun demikian dosen. Perbandingan laki-laki dan perempuan sekitar 70:30 persen. Mendatang, mahasiswa perempuan dan laki-laki harus seimbang.

APA YANG TERLINTAS dalam pikiran Anda ketika berbicara mengenai masalah gender? Masalah yang cukup membuat kaum wanita termarginalkan dengan berbagai macam, seperti persoalan perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan baik tentang kedudukan maupun dalam tatanan sosial di masyarakat. Kata gender merupakan istilah yang baru, muncul di masyarakat Barat pada sekitar 1980-an.

Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin. Tidak ada bias gender dalam Islam. Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Contoh konkretnya adalah Islam tidak membedakan laki-laki dan wanita dalam hal tingkatan takwa, dan surga juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja. Tetapi untuk laki-laki dan perempuan

yang bertakwa dan beramal saleh.

Pandangan inilah yang ternyata menjadi acuan Dekan Fakultas Ilmu Kedokteran dan Kesehatan (FKIK), Prof Dr dr MK Tajudin Sp. And, untuk menghilangkan bias gender yang ada di FKIK. Menurutnya saat ini sumber daya manusia yang ada di FKIK didominasi oleh perempuan.

Layaknya fakultas kedokteran universitas lain, mahasiswa FKIK UIN Jakarta didominasi kaum hawa. Jumlah mahasiswa perempuan jauh lebih banyak daripada jumlah mahasiswa laki-laki. Di tingkatan dosen pun demikian, jumlah dosen perempuan mayoritas perempuan.

“Jujur saja sumber daya manusia yang ada di FKIK lebih didominasi oleh kaum perempuan, bahkan untuk jumlah dosen dan mahasiswa perbandingan antara laki-laki dan perempuan mungkin sekitar 70:30 persen,” kata Tajudin.





Tadjudin menjelaskan, sistem pendidikan yang berlaku di fakultasnya sama sekali tidak menganut pandangan gender atau tindakan diskriminasi lainnya. Selain itu dalam pelayanan dan pemberian fasilitas pun diberlakukan sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sangat diperlukan guna menghindari kesenjangan sosial antar-mahasiswa dan pegawai.

“Untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi kita memberikannya melalui contoh yaitu mereka diperlukan sama. baik laki-laki maupun perempuan. Di FKIK tidak ada bias gender meskipun pada umumnya lebih didominasi oleh perempuan. Kita juga memberikan fasilitas dan kesempatan yang sama di semua bidang. Sehingga di FKIK tidak muncul bias gender atau perbedaan yang lain,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan FKIK Dra Farida Hamid M.Pd. Perempuan lebih mayoritas bukan menandakan adanya bias gender maupun diskriminasi sosial, melainkan ada kesalahan pemahaman masyarakat yang menganggap fakultas kedokteran ataupun keperawatan lebih cocok untuk perempuan. “Mungkin ini kesalahan mindset masyarakat, padahal di FKIK sendiri sangat terbuka untuk siapa saja,” katanya.

Akan tetapi, lanjutnya, setiap tahun jumlah mahasiswa laki-laki terus bertambah. Misalnya tahun lalu di Program Studi Keperawatan mahasiswa laki-laki hanya dua orang, tetapi di tahun ini jumlahnya menjadi tujuh orang. Bertambahnya mahasiswa laki-laki meski tak terlalu signifikan merupakan angin segar bagi FKIK untuk menghapus mindset masyarakat yang menilai FKIK diperuntukkan khusus perempuan. Menurutnya, di masa mendatang perbandingan mahasiswa FKIK antara perempuan dan laki-laki akan simbang.

Berbicara mengenai tenaga pengajar dan karyawan FKIK, kaum hawa tetap mendominasi. Berdasarkan data Biro Administrasi Umum dan Kepegawain UIN Jakarta, saat ini FKIK memiliki dosen sebanyak 86 orang, 26 laki-laki

dan 60 perempuan. Sedangkan jika dilihat dari sisi tingkat pendidikannya, dosen berpendidikan S3 berjumlah empat orang, S2 58 orang, dan S1 24 orang.

Selanjutnya, dari sisi jabatan fungsional dosen berjumlah 73 orang, di antaranya gurubesar berjumlah dua orang, lektor kepala dua orang, lektor sebelas orang, asisten ahli dua puluh tiga orang, tenaga pengajar dua puluh lima orang, CPNS calon dosen berjumlah sepuluh orang.

“Memang dari segi tenaga pengajar lebih banyak perempuan, namun kualitas kinerja laki-laki dan perempuan tetap sama. Mereka memperoleh perlakuan yang sama dan tidak ada intimidasi apapun kepada kaum laki-laki yang jumlahnya jauh lebih sedikit,” ujar Farida.

Masih menurut Farida, setiap perekrutan karyawan atau dosen FKIK selalu terbuka untuk umum, namun yang mendaftar lagi-lagi kebanyakan para perempuan. Diakui Farida memang wanita jauh lebih terbuka jika dibandingkan dengan laki-laki, tetapi sebenarnya mereka mempunyai kemampuan dan kualitas kerja yang baik. “Kita selalu terbuka untuk umum dan tidak pernah menerima pegawai berdasarkan jenis kelamin ataupun yang lain, semua sama saja,” tegasnya.

Farida menambahkan saat ini FKIK telah memiliki asrama untuk seluruh mahasiswa baru. Awal mulanya gedung asrama tersebut memang diperuntukkan untuk semua mahasiswa; laki-laki dan perempuan. Namun pada praktiknya asrama tersebut hanya ditempati mahasiswa perempuan, mahasiswa laki-laki ditempatkan di gedung C asrama putra.

“Kalau di sini jelas ada perbedaan fasilitas layanan bagi mahasiswa perempuan dan laki-laki, di gedung baru mahasiswa perempuan mendapat layanan gedung yang baru, sementara laki-laki tidak,” katanya.

Farida menjelaskan perbedaan dan pemisahan ini bukan sebagai perlakuan bias gender terhadap laki-laki melainkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gedung

baru tersebut sedikitnya dapat menampung 304 orang, tapi karena jumlah mahasiswa perempuan mencapai 240 orang, maka gedung baru itu ditempati mahasiswa perempuan.

“Kebetulan saat ini jumlah mahasiswa laki-laki hanya

mencapai 79 orang, jadi terpaksa mereka ditempatkan di asrama yang lama, tapi sekali lagi tidak ada bias gender di FKIK, kami akan tetap sama memperlakukan semua warga FKIK baik itu laki-laki dan perempuan,” tegasnya.[]

NINA RAHAYU

Dekan FKIK, Prof Dr MK Tadjudin

Dosen Perempuan Tidak Kalah Baik dari Dosen Laki-laki

Bisa Anda jelaskan tentang wacana gender di FKIK?

FKIK memang fakultas yang sumber daya manusianya mayoritas perempuan, jumlah dosen maupun mahasiswa yang perempuan mungkin sekitar 70 persen.

Adakah perlakuan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan?

Tidak ada. Untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi kita memberikannya melalui contoh yaitu mereka diperlakukan sama. Selama ini kami memperlakukan mereka sama, baik laki-laki maupun perempuan. Di FKIK tidak ada bias gender meskipun pada umumnya lebih didominasi perempuan, selain itu kita juga memberikan fasilitas dan kesempatan yang sama di semua bidang. Sehingga di FKIK tidak muncul bias gender atau perbedaan yang lain.

Jika bias gender dalam pelayanan mahasiswa dan administrasi?

Kalau dari segi pelayanan tidak ada, hanya mungkin bagi perempuan harus memakai pakaian yang sesuai dengan konsep UIN, yaitu harus menutup aurat, sedangkan untuk laki-laki mungkin tidak ada peraturan khusus hanya berpakaian sopan saja.

Adakah matakuliah yang memuat kesetaraan gender?

Tidak ada. Sejauh ini tidak ada matakuliah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena memang kita tidak memerlukan matakuliah seperti itu. Kita tidak memberikan matakuliah berdasarkan gender. Kita memandang manusia secara seutuhnya baik laki maupun perempuan.

Dalam matakuliah keagamaan adakah yang membahas gender?

Sejauh ini tidak ada, karena baik calon dokter laki-laki atau perempuan tetap sama dalam memeriksa pasien, yakni dokter perempuan juga harus memeriksa pasien laki-laki, begitu juga sebaliknya. Dan tidak pernah ada masalah menyakut bias gender maupun yang lain.

Ke depan adakah rencana untuk memasukkan matakuliah gender?

Tidak ada juga, kita tidak melihat keperluannya, kita mengajarkan tentang perbedaan yang memang diperlukan,

seperti perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tapi dari segi pendidikan mereka mendapatkan porsi yang sama.

Jika dilihat dari kuantitasnya bagaimanakah produktivitas dosen laki-laki dan perempuan?

Berhubung dosen juga lebih banyak perempuan, jadi saya menganggap dosen perempuan tidak kalah baik dari dosen laki-laki. Kita tidak melihat ada perbedaan itu, di sini dari kaprodi satu perempuan, dan sekprodi tiga perempuan.

Jika ada undangan keluar kampus adakah kriteria khusus baik laki-laki atau perempuan yang akan mewakili fakultas?

Tidak, saya berdasarkan hanya pada kompetensi mereka, siapa yang paling berkompeten itu yang ikut. Artinya dia yang akan mewakili fakultas. Mungkin karena perempuan lebih banyak, jadi lebih banyak perempuan yang keluar kampus, baik pengiriman dosen ke luar negeri juga tetap berdasarkan kompetensi.

Bagaimana Anda memimpin FKIK tanpa bias gender sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial?

Saya melihat mereka sesuai dengan kompetensinya tanpa melihat laki-laki dan perempuan, dan tidak ada perlakuan istimewa. Saya tidak mendidik ada bias gender. Kita juga tidak memikirkan ada bias gender.

Bagaimanakah pandangan Anda tentang gender?

Laki-laki dan perempuan adalah sama, tapi tetap perhatikan biologis mereka dan di sini pun tidak ada kuota penerimaan mahasiswa berdasarkan gender antara laki-laki dan perempuan, yang ada hanya pesantren dan non pesantren. Dan inilah keadaan yang sedang berjalan dan semoga tidak ada masalah mengenai gender.

Di tahun ini adakah pengembangan khusus yang dilakukan FKIK?

Pengembangan dari kurikulum selalu ditinjau, artinya selalu ada perubahan meskipun itu kecil. Apalagi sekarang kita sudah mulai pindah ke gedung yang baru.[]

>> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Semua Mendukung *Gender Mainstreaming*

Tiang pertama gedung FISIP sudah dipancangkan. Perkembangan fakultas ini semakin melangkah ke depan. Beberapa kurikulum direview. Pun memasukkan tentang gender ke dalam beberapa matakuliah. Ada dominasi laki-laki atas perempuan.

SELASA, AWAL OKTOBER, menjadi sejarah baru bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Bakda duhur, sejarah perkembangan FISIP itu ditorehkan. Menteri Agama RI, Suryadharma Ali, memancangkan tiang pertama pembangunan Gedung FISIP di atas lahan bekas Wisma Kertamukti, seluas 13.000m², di kampus 2. Torehan episode sejarah baru itu disaksikan Rektor UIN Jakarta, Prof Dr Komaruddin Hidayat, Dekan FISIP, Prof Dr Bahtiar Effendy, dan tamu-tamu undangan.

Inilah babak baru perjalanan FISIP. Fakultas ini memang baru setahun menyelenggarakan proses belajar-mengajar. Sejak awal dibuka pada tahun akademik 2009/2010, mahasiswa, dosen, dan staf administrasi FISIP menempati Gedung Fakultas Psikologi. Sambil menunggu pembangunan gedung baru itu rampung, FISIP terus berbenah, termasuk

mereview matakuliah pada setiap prodi; Prodi Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, dan Prodi Hubungan Internasional.

FISIP tampaknya memang memancarkan harapan dan semangat baru. Salah satunya, FISIP mulai menyentuh wacana gender. FISIP sudah memasukkan tentang gender pada matakuliah, yang diberikan sejak semester empat dan lima bagi mahasiswa Prodi Ilmu Politik dan Prodi Sosiologi. Sementara di Prodi Hubungan Internasional (HI), wacana gender menjadi salah satu subbagian matakuliah, yakni di dalam isu-isu kontemporer.

FISIP tampaknya dituntut untuk lebih *open mind* dalam segala bidang keilmuan. Hal ini juga diakui M. Zamzani Kiram, kepala Subbagian Administrasi FISIP. Menurutnya, "Kita nantinya akan banyak terjun ke masyarakat. Karenanya mahasiswa harus tahu tentang itu (wacana gender)





agar dapat diterapkan di mana pun nantinya mereka berada,” paparnya.

Namun, jika berbicara mengenai komposisi gender di tingkatan struktural, khususnya staf dan mahasiswa di FISIP, laki-laki masih mendominasi di dalamnya. Di kalangan tenaga pengajar, FISIP memiliki 29 dosen tetap, dan hanya delapan orang dari mereka adalah perempuan. Dosen kontrak, ada tiga laki-laki dan seorang perempuan. Sementara dosen yang meraih doktor berjumlah 7 orang, dan seorang diantaranya adalah perempuan. Terlebih untuk dosen yang bergelar gurubesar; semua didominasi laki-laki sebanyak 4 orang. Sementara prosentasi mahasiswa juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dari 100% jumlah mahasiswa, 70% di antaranya adalah laki-laki, dan sisanya adalah perempuan.

Apakah data di atas menunjukkan adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di lingkungan FISIP? Jawabannya tergantung dari perspektif mana melihatnya. Semua itu memang tidak lantas menjadi jaminan untuk mengklaim terjadinya ketidakadilan gender.

Jika menggunakan perspektif feminis, perbedaan kuantitas itu menjadi hal yang penting, bahkan indikator terjadinya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Paling tidak, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan adalah, apakah sudah tersedia akses yang sama antara laki-laki dan perempuan di FISIP? Kalau ia dengan cara apa? Apakah sudah ada langkah-langkah yang dilakukan untuk memotivasi dan mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif, adakah langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk itu, misalnya *affirmative action*?

Dekan FISIP, Prof Dr Bahtiar Effendy menegaskan, wacana gender memang penting untuk terus disuarakan. Ia menyadari betul bahwa budaya “menomorduakan” perempuan masih kerap kali terjadi di beberapa wilayah. Hanya saja, pengarusutamaan gender itu seharusnya tidak merugikan pihak laki-laki.

“Pandangan saya mungkin tidak populer. Saya bisa memahami landasan tentang gender. Saya paham ada diskriminasi, makanya harus ada *affirmative action*. Tapi saya lebih

cenderung mendekatinya dengan pendekatan kompetensi. Artinya, ketika kesempatan itu sudah ada, perempuan juga harus memperlihatkan kemampuannya. Jadi sebenarnya yang penting adalah penguatan (*empowerment*) dari pihak perempuan sendiri. Harus ada langkah-langkah untuk memberdayakan perempuan,” kata Bahtiar.

Patut diapresiasi bahwa, sejauh ini wacana gender sudah mulai disadari bahkan didukung oleh beberapa pihak di FISIP. Zamzani, misalnya, mengaku sangat mendukung adanya wacana kesetaraan ini. “Dengan begitu, adanya pemahaman tentang hak-hak perempuan yang sama dengan laki-laki, itu juga bisa membantu meningkatkan pendapatan perempuan,” tambahnya lagi.

Salah satu mahasiswi FISIP, Kholisoturrusur, juga mendukung pernyataan di atas. Lilis, begitu ia biasa dipanggil, yang saat ini menjadi mahasiswa Prodi HI, mendukung ditingkatkannya wacana gender sesuai kebutuhan. Ia melihat bahwa, pada umumnya, teman-teman di kelasnya sudah mulai tahu dan aktif berbicara mengenai wacana gender. “Awalnya kita semua nggak ngerti tentang gender, tapi karena ada subbagian matakuliah gender, yaitu di dalam isu-isu kontemporer, terus ngobrol-ngobrol dengan dosen dan teman-teman kelas, kita pun jadi mulai tahu dan ngerti,” akunya.

Beruntunglah, pengarusutamaan gender di FISIP juga didukung oleh beberapa dosen perempuan yang cukup konsen dalam menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender. Sebut saja, Ida Rosidah, MA, yang juga menjabat sebagai ketua Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, Haniah Hanafi, Gevarina Johan, dan lainnya. Mereka cukup aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, baik melalui media seperti menulis di jurnal-jurnal maupun menjadi narasumber di beberapa seminar dan workshop keperempuanan. Paling tidak, hal itu dapat menjadi stimulus khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi FISIP untuk lebih mengenal wacana gender, seiring dengan semangat baru dengan dimulainya pemancangan tiang gedung baru FISIP.[]

MILASTRI MUZAKKAR

Dekan FISIP, Prof Dr Bahtiar Effendy

Mengutamakan Pendekatan Kompetitif

Pandangan Anda terkait wacana gender di FISIP secara umum?

Gender kan sebenarnya merupakan wacana klasik, di dalam ilmu fikih juga sudah ada. Di dalam konteks politik juga bukan wacana baru. Ada kesadaran dari kalangan akademisi-akademisi untuk memasukkannya ke dalam struktur matakuliah. Misalnya ada *political gender*, atau *gender in politics*. Itu secara formal, karena sesungguhnya substansi gender juga ada dalam matakuliah-matakuliah yang lain. Misalnya di matakuliah sosiologi. Cuma memang wacana gender belum terintegrasikan dengan baik di Prodi Hubungan Internasional. Agak sulit memasukkannya sebagai disiplin ilmu, meski sebenarnya itu penting untuk dipelajari mahasiswa Prodi HI.

Bagaimana komposisi laki-laki dan perempuan di kalangan staf administrasi, dosen, dan mahasiswa di FISIP?

Saya belum pernah menghitung. Sepertinya perempuan lebih sedikit jumlahnya ketimbang laki-laki, khususnya mahasiswa Prodi Ilmu Politik dan Prodi Sosiologi. Sementara staf administrasi pada bulan-bulan awal pembukaan FISIP, sebelum 4-5 bulan terakhir, staf administrasi perempuan lebih banyak. Ada Novi, Lili, Erna, Bu Supri, dan Bu Lily. Sementara laki-lakinya hanya Pak Zamzani dan Rahmat. Namun, terakhir ini ada tambahan tenaga staf, sebanyak 4 orang, yang semua laki-laki. Akhirnya laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Sedangkan komposisi dosen tetap mungkin lebih banyak dibanding perempuan. Itu karena, mereka semua pindahan dari Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, belakangan, kita baru menerima 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ya, karena kebetulan yang daftar memang tidak seimbang. Tapi kalau dimasukkan jumlah dosen tidak tetap dan kontrak, itu jumlahnya hampir seimbang. Kalaupun ada kelebihan, bandingannya antara dosen laki-laki dan perempuan sekitar 60:40.

Pernah tidak FISIP melakukan rekrutmen supaya seimbang kuota antara laki-laki dan perempuan?

Oh, tidak. Kalau saya memang tidak percaya bahwa laki-laki dan perempuan harus seimbang. Saya percaya, yang pertama, adalah kompetensi, karena yang kita tetapkan di sini tidak ada diskriminasi. Kalau misalnya tidak ada yang tertarik jadi staf di sini bagaimana? Masa saya harus nyari-nyari perempuan supaya tertarik di sini? Yang penting antara laki-laki dan perempuan bukan berarti harus sama, tapi yang penting tidak ada diskriminasi.

Ada tidak hasil karya buku, jurnal, dan lainnya tentang gender yang dihasilkan oleh FISIP?

Saya tidak tahu persis tapi saya kira ada. Kalau Anda melihat tulisan-tulisan Ibu Ida Rosidah, dosen Prodi Sosiologi, yang juga ketua Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, yang kebetulan juga memegang matakuliah gender, mungkin ada. Kalau saya sendiri kan memang bukan spesialisasi saya di bidang itu. Di sini banyak dosen perempuan tapi saya kan tidak bisa memaksa mereka untuk konsen di bidang yang memang bukan keahlian atau keinginannya. Tapi kalau sama Ibu Ida, mungkin saya bisa bilang atau minta supaya dia mengintensifkan wacana ini.

Menurut Anda bagaimana seharusnya wacana gender itu diaplikasikan?

Bagi saya yang terpenting adalah sikap diskriminasi harus dihilangkan. Saya beberapa kali berdebat dengan teman-teman di FISIP UI. Mereka yang menginginkan ada *affirmative action* di semua bidang, sementara saya tetap mengatakan bagaimana kalau misalnya itu diterapkan tapi tidak kompetitif? Apakah secara moral itu tidak menurunkan derajat perempuan? Apakah, misalnya, ada dua mahasiswa laki-laki dan perempuan, laki-laki nilainya 8 dan perempuan nilainya 4, apakah laki-laki ini harus dikorbankan atas nama *affirmative action*? Sampai kapan akan terus begini? Seharusnya ada batasan juga sampai kapan *affirmative action* ini diberlakukan. Menurut saya, setelah ada kesempatan yang sama, seharusnya kan perempuan melakukan langkah-langkah untuk memotivasi peningkatan kualitas dirinya.

Seperti apa langkah-langkah itu?

Untuk meningkatkan itu dengan cara race program saja. Misalnya, katakanlah bahasa Inggrisnya kurang, maka itu yang harus digenjut. Kalau wacana 30% di DPR misalnya, nggak ada program itu, hanya memasukkan saja.

Makanya untuk melawan dominasi laki-laki itu, perempuan harus memperkuat dirinya sendiri. Lihat saja Dewi Fortuna Anwar, Marwah Daud Ibrahim, misalnya. Mereka tidak dapat *affirmative action* tapi mereka punya *inner drive* sendiri.

Saya setuju kalau *affirmative action* dilihat sebagai salah satu cara, tapi jangan dilihat sebagai satu-satunya cara. Di sini saya mendukung semua mahasiswa untuk berkompetensi. Ada dosen yang saya minta meresensi buku-buku saya. Jadi semua kami dukung, yang penting berkompeten.[]

>> Sekolah Pascasarjana

Desain Kurikulum SPs Sangat Terbuka

Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta punya peran besar dalam mengembangkan gender mainstreaming dalam proses pengajaran di sekolah, madrasah bahkan di perguruan tinggi. Untuk itu, SPs memberikan perhatian lebih kepada perempuan sejak mereka akan kuliah di SPs.

“KEBIJAKAN KITA KETIKA merekrut mahasiswa harus memberikan perhatian lebih kepada mahasiswa-mahasiswa perempuan. Jika ada mahasiswa perempuan yang kurang memenuhi, diberikan perhatian dan kebijakan khusus,” jelas Deputy Direktur Bidang Akademik dan Kerjasama, Fuad Jabali.

Perhatian khusus kepada perempuan selalu dilakukan dalam setiap penerimaan mahasiswa baru di SPs. Hal tersebut merupakan upaya memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk melanjutkan ke jenjang yang

lebih tinggi.

Langkah lain dalam upaya pengarusutamaan gender ini sudah dilakukan ketika mendesain kurikulum. Menurut Fuad, saat mendesain kurikulum matakuliah di SPs, ada beberapa strategi yang dilakukan. Pertama, mendesain matakuliah yang sangat kental bermuatan penguatan gender. “Ada mata kuliah yang diasuh, dari judulnya saja diketahui bahwa itu tentang perempuan,” paparnya.

Strategi kedua, merekrut dosen-dosen yang punya perhatian pada persoalan gender untuk mengajar matakuliah-





matakuliah yang terdapat isu tentang gendernya. Misalnya, Nasaruddin Umar mengajar tafsir. Karena ia punya perspektif gender, maka diharapkan ia akan memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu perempuan. Ketiga, mendesain matakuliah yang kondusif membicarakan persoalan-persoalan perempuan, seperti Hukum Keluarga Muslim.

“Biar perspektifnya lebih luas, kita mendesain matakuliah yang sifatnya interdisipliner. Tidak hanya di Indonesia tapi di dunia muslim. Ketika kita bicara tentang gender, kita bisa belajar dari komunitas-komunitas lain,” tambahnya.

Pengarusutamaan gender mulai menguat di SPs setelah ada pengembangan kerjasama dengan beberapa lembaga, khususnya dengan Canadian International Development Agency (CIDA). Salah satu unit kerjasama dengan CIDA mendirikan kajian interdisipliner, yaitu Islam interdisipliner. Dalam desain kerjasama tersebut, dikembangkan isu-isu gender sebagai bagian dari strategi *project*.

Dengan kajian interdisipliner tersebut desain matakuliah yang dikembangkan di SPs dibuat dengan sangat terbuka. Sehingga bisa didekati dari berbagai perspektif. Mempelajari tafsir, fikih dan serta matakuliah lainnya, para maha-

siswanya punya kewajiban untuk mengembangkan wacana lain.

Menurut Fuad, lulusan SPs ini punya dua karakteristik. Pertama, ‘satu kaki’ mereka didorong untuk memasuki tradisi Islam. Kedua, ia juga didorong untuk menguasai literatur di luar studi Islam yang terkait dengan disiplin ilmunya. “Jadi ia menguasai tradisi Islam, tapi ia dituntut untuk menghubungkannya dengan wacana yang lebih umum,” katanya.

Dengan dua kemampuan tersebut, diharapkan bisa melahirkan generasi baru yang mampu bicara tentang gender. Pembicaraan mereka tidak terkungkung dengan tradisi Islam, tetapi ia punya kemampuan untuk meminjam pendekatan-pendekatan lain untuk memahami ajaran Islam. Setelah itu mereka diharapkan bisa membagi kembali hasil kajian kepada komunitas yang lebih luas. “Itu langkah strategis yang bisa dimainkan alumni SPs,” tambahnya.

Dengan adanya kajian interdisipliner tersebut, mahasiswa SPs akan lebih terbuka melihat berbagai wacana yang berkembang, termasuk peangarusutamaan gender. Misalnya, dalam menulis tesis atau disertasi tentang perempuan, mahasiswa SPs harus melihatnya tidak secara ideologis. SPs

mendorong mahasiswanya untuk melihat secara adil pro-kontra isu-isu gender. Hal itu menjadi poin penting bagi lulusan SPs untuk membicarakan persoalan gender secara lebih adil dan sehat.

SPs sudah mengembangkan kultur akademik yang mendorong pada pengarusutamaan gender. Namun, untuk tenaga pengajar, antara lak-laki dan perempuannya masih tidak sebanding. Hal itu karena pengajar di SPs adalah dosen yang bergelar dokter dan gurubesar. “Di sini yang ngajar hanya gurubesar dan doktor. Kalau magister tidak ngajar. Perempuan yang bergelar doktor tidak banyak,” jelas Fuad.

Menurut Fuad, hal tersebut terkait dengan berbagai hal, mulai dari sistem kepegawaian, promosi dan kesempatan pendidikan yang diberikan oleh lembaga-lembaga kepada perempuan. Tenaga pengajar di SPs sekarang merupakan

produk tahun 70-an.

Namun demikian, optimisme akan adanya perubahan mulai tumbuh. Sekarang sudah banyak tenaga pengajar baru dari kalangan perempuan. “Dari lima dosen baru sekarang, tiganya adalah perempuan. Mereka adalah produk dari program-program pengiriman yang kita beri perhatian kepada perempuan,” pungkasnya.

Beberapa tahun terakhir, pengarusutamaan gender mendapat apresiasi besar dari mahasiswa SPs. Tesis dan disertasinya secara konsisten setiap tahun, bahasan tentang gender selalu ada. Misalnya, “Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Hadis”, “Kepala Negara Perempuan; Studi terhadap Pandangan Mufassir Indonesia”, dan “Rawi Perempuan dalam Hadis Nabi (Studi Mata-rantai Perwayatan Hadis)”, dan lainnya.[]

AINUR RAHMAN

Deputi Direktur SPs, Dr Fuad Jabali, MA Berdampak pada Penguatan Kurikulum Madrasah dan Pesantren

Apa program SPs dalam upaya gender mainstreaming?

Kebijakan kita ketika merekrut mahasiswa harus memberikan perhatian lebih kepada mahasiswa-mahasiswa perempuan. Jika ada mahasiswa perempuan yang kurang memenuhi, diberikan perhatian dan kebijakan khusus. Kita terima dan kita improf. Hal itu penting untuk peningkatan madrasah dan pesantren yang murid-muridnya diisi oleh perempuan. Memberikan perhatian pendidikan kepada perempuan akan memberikan dampak luar biasa kepada penguatan kurikulum di madrasah dan pesantren.

Ini dilakukan di SPs?

Iya, setiap penerimaan mahasiswa baru.

Kapan gender mainstreaming dilakukan?

Pengarusutamaan gender ini menguat setelah kita kembangkan kerjasama dengan beberapa lembaga, khususnya dengan CIDA. Itu dimulai pada 2002. Dalam desainnya ada isu-isu gender. Karena itu bagian dari strategi project.

Berapa perbandingan antara dosen perempuan dan laki-laki?

Di sini yang ngajar hanya gurubesar dan doktor. Kalau magister tidak ngajar. Perempuan yang punya gelar doktor tidak banyak. Itu terkait dengan sistem kepegawaian kita, promosi dan kesempatan pendidikan yang diberikan oleh lembaga-lembaga kepada perempuan. Dari generasi sekarang banyak sekali. Dari lima dosen baru sekarang, tiganya adalah perempuan. Mereka adalah produk dari program-program pengiriman yang kita beri perhatian kepada perempuan.

SPs cukup berperan dalam menyiapkan tenaga pengajar di tingkat sarjana. Bagaimana mengambil peran dalam gender mainstreaming?

Kurikulum yang kita desain sangat terbuka. Sehingga bisa didekati dari berbagai perspektif. Belajar tafsir, fikih dan belajar apapun di SPs ini ada kewajiban untuk mengembangkan pendapat interdisipliner. Ada mahasiswa yang menulis tentang perempuan dalam disertasinya. Ketika mereka menulis, mereka tidak menulis persoalan perempuan sebagai seorang ideolog. Berbeda dengan seorang aktivis. Seorang aktivis ketika menulis persoalan perempuan sangat ideologis.

Berapa banyak mahasiswa SPs membahas persoalan gender dalam tesis/disertasi?

Secara konsisten setiap tahun selalu ada yang membahas persoalan perempuan.

Dalam unsur pimpinan SPs sendiri, ada berapa perempuan yang di posisi tersebut?

Saya sudah 6 tahun, dan hanya satu orang perempuan yang menjadi deputi.

Apa disebabkan faktor SDM?

Ketika kita memilih mahasiswa ada kebijakan *affirmatife policy*. Pada level tertentu *affirmatife policy* tidak baik. Misalnya di SPs, tidak bisa memilih direktur karena persoalan gender, atau afiliasi keagamaan di Indonesia. Jadi lihat yang paling mampu. Mungkin ada beberapa orang memenuhi syarat untuk dipilih, tapi kenyataannya mereka tidak dipilih oleh senat.[]